SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 5 1994 Seri : D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 1 TAHUN 1994

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN 1994/1995 - 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berpedoman kepada Garis-garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung merupakan landasan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, baik untuk Pembangunan Jangka Panjang maupun Pembangunan Jangka Menengah;

c. bahwa hasil-hasil pembangunan selama Pelita V di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan potensi dan kondisi serta permasalahan, sehingga Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ban-

dung yang disusun lima tahun yang lalu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1988, perlu ditinjau dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ke Kota Soreang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993, tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor IV Tahun 1984;

12. Peraturan Bersama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

(1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung merupakan pokok-pokok kebijaksanaan sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan Pembangunan Daerah;

(2) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung merupakan penjabaran dari Garis-garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat setelah memperhatikan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

(3) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung merupakan landasan pokok bagi Penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah.

Pasal 2

Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung disusun dengan sistematika sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III : PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

BAB IV : PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KE-ENAM DAERAH

BAB V : PELAKSANAAN

BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut di atas, terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung berkewajiban untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, sepanjang sifat dan isinya tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Soreang, 5 Februari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Ketua,

Cap/ttd

H. HOLIL SUKARDI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd

H. U. HATTA D.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/Sk.1646-Huk/94
tanggal 19 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/ttd

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bandung tanggal 26 Oktober 1994
Nomor 5 Seri D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480042996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 1 TAHUN 1994
TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN 1994/1995 - 1998/1999

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, sebagai penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, potensi, serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pola Dasar ini merupakan garis besar arahan dan pedoman pembangunan sekaligus sebagai pernyataan kehendak masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dimaksudkan sebagai pedoman bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Aparatur Pemerintah Pusat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dalam menyelenggarakan pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dapat berjalan lebih terarah, efisien dan efektif.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam Jangka Menengah Lima Tahun Keenam dan Jangka Panjang Kedua,

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 1 TAHUN 1994
TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN 1994/1995 - 1998/1999

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, sebagai penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, potensi, serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pola Dasar ini merupakan garis besar arahan dan pedoman pembangunan sekaligus sebagai pernyataan kehendak masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dimaksudkan sebagai pedoman bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Aparatur Pemerintah Pusat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dalam menyelenggarakan pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dapat berjalan lebih terarah, efisien dan efektif.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam Jangka Menengah Lima Tahun Keenam dan Jangka Panjang Kedua,

sehingga secara bertahap dapat terwujud tujuan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan kerangka Pembangunan Nasional dan Regional Jawa Barat.

C. LANDASAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dijiwai oleh Pancasila sebagai landasan idiil, serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Isinya merupakan penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai landasan operasional.

D. RUANG LINGKUP

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung terdiri atas Pembangunan Jangka Panjang Kedua dan Pembangunan Lima Tahun Keenam Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Materinya mencakup seluruh aspek dan bidang pembangunan daerah.

Sistematika Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Pembangunan Daerah

Bab III Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah

Bab IV Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah

Bab V Pelaksanaan

Bab VI Penutup

BAB II

PEMBANGUNAN DAERAH

A. KONDISI DAN POTENSI DAERAH

Kondisi dan potensi daerah merupakan gambaran mengenai kondisi dan potensi dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana apa adanya serta kondisi dan potensi yang tercipta sebagai hasil pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Pertama. Uraian mengenai kondisi dan potensi tersebut mencakup aspek fisik, kependudukan, ekonomi, sosial, pemerintahan dan pembiayaan.

Keenam aspek tersebut telah mengakomodasikan bidang-bidang pembangunan, yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Hukum, Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa serta Bidang Pertahanan Keamanan.

Kondisi dan potensi Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah sebagai berikut :

1. Fisik

Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung terletak antara $6^{o}41'$ sampai $7^{o}19'$ Lintang Selatan dan $107^{o}22'$ sampai $108^{o}5'$ Bujur Timur, pada ketinggian antara 110 meter sampai dengan 2.429 meter diatas permukaan laut.

Luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung 309.207,93 hektar dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dan Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.
Sebelah Timur	:	Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Daerah Tingkat II Garut dan Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
Sebelah Barat	:	Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur
Bagian Tengah	:	Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. .

Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung merupakan cekungan

di dataran tinggi Bandung yang morfologinya terdiri atas wilayah datar/landai, kaki bukit dan pegunungan. Kemiringan lerengnya bervariasi antara 0-8 %, 8-15 %, hingga diatas 45 %. Sebagian besar wilayah kaki bukit dan pegunungan terbentang sepanjang bagian utara dan selatan serta bagian barat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan kemiringan beragam antara 25-45% dan lebih besar dari 45%. Wilayah ini merupakan daerah tangkapan air yang penting, khususnya formasi Cibeureum. Secara hidrogeologis, wilayah ini merupakan kawasan lindung yang berfungsi menjaga keseimbangan hidroorologis cekungan Bandung.

Dataran Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung terhampar luas di bagian tengah cekungan Bandung dengan kemiringan antara 0-2% dan 2-8% kearah barat dan ke arah sungai Citarum yang membelah wilayah dari timur ke barat. Wilayah ini merupakan kawasan persawahan subur yang sebagian di antaranya rawan banjir. Kota-kota yang merupakan satelit dan sembrani tandingan (counter magnet) dari kota Bandung terdapat di wilayah ini.

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung beriklim tropis dan dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 1500 sampai dengan 4.000 mm/tahun; suhu rata-rata berkisar antara 19^{o}C sampai 24^{o}C dengan penyimpangan harian dapat mencapai 5^{o}C; serta kelembaban udara bervariasi antara 78% pada musim hujan dan 70% pada musim kemarau.

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung terdapat 172 buah sungai besar dan kecil. Dari jumlah tersebut, yang berair sepanjang tahun sekitar 30-40 %. Sungai-sungai tersebut, diantaranya Sungai Citarum dan Cisangkuy dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain : pengairan, sumber air baku PDAM dan sumber pembangkit listrik tenaga air. Akan tetapi disamping potensinya yang besar sungai-sungai yang ada seringkali menjadi masalah dan membawa kerugian, di antaranya berupa banjir rutin.

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung terdapat pula sumber energi panas bumi yang teletak di Puncak Gunung Kamojang (Bandung Selatan) dan telah dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang. Disamping itu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung kaya akan bahan tambang golongan C,

antara lain : Batu gamping, batu andesit, teras, marmer, kaolin, batu kuarsa dan sirtu yang lokasinya tersebar di Kecamatan Padalarang, Cipatat, Margaasih, Batujajar, Cicalengka, Baleendah dan Majalaya.

Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung relatif sangat subur sebagai hasil pelapukan endapan lahar breksi tufa serta aliran lava yang dihasilkan dari letusan gunung api yang terjadi dalam beberapa fase. Pemanfaatan lahan di wilayah pegunungan berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan wisata, perkebunan (teh, kina); sedangkan wilayah kaki bukit dimanfaatkan untuk budidaya tanaman holtikultura (terutama sayuran), perkebunan teh, dan kebun campuran.

Sejalan dengan pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, terdapat kecenderungan kawasan terbangun kota, khususnya permukiman, jasa perhotelan, dan industri, merambah kawasan persawahan subur dan kawasan yang seharusnya berfungsi lindung. Industri tumbuh pesat di bagian barat (Kecamatan Batujajar dan Cimahi Selatan) serta di bagian selatan, tengah dan timur (Kecamatan Katapang, Pameungpeuk, Banjaran, Dayeuhkolot, Majalaya, dan Rancaekek). Kegiatan permukiman tumbuh pesat secara tersebar, terutama di sekitar Kota Bandung serta di sekitar zone-zone industri, pada lokasi-lokasi yang harga lahannya relatif masih murah. Kegiatan jasa perhotelan tumbuh pesat di wilayah bagian utara, terutama di Kecamatan Lembang.

Kecenderungan pertumbuhan di wilayah bagian utara serta eksploitasi air tanah secara berlebihan, mulai mengganggu keseimbangan tata air. Koefisien air larian semakin tinggi sehingga menimbulkan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau, serta muka air tanah menurun cukup dalam. Saat ini terjadi konflik kepentingan air baku untuk kebutuhan domestik (PDAM), industri, dan pengairan.

Pada tahun 1992, gambaran pemanfaatan lahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah sebagai berikut : Pemukiman 30.753,8259 Ha (9,95 %); Industri 2.183,5485 Ha (0,70 %); Sawah 68.464,0674 Ha (22,14 %); Tegalan/Ladang 30.409,9565 Ha (9,83 %); Kebun campuran 32.680,0767 Ha (10,57 %); Perkebunan. 37.970,1700 Ha (11,96 %); Hutan 85.942,3700 Ha (27,79 %);

Waduk/Situ/Kolam 12.223,9800 Ha (3,95 %); Padang rumput 732,8750 Ha (0,24 %); dan lain-lain 8.819,0600 Ha (2,85 %).

Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dikenal sebagai daerah wisata. Udaranya yang sejuk, pemandangan alamnya yang indah, penduduknya yang ramah, serta khasanah seni budaya tradisional yang khas seperti : Seni tari, wayang golek, angklung, dan calung, merupakan daya tarik yang telah memberikan andil yang besar dalam pengembangan kepariwisataan Jawa Barat maupun Nasional.

Kedudukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang mengelilingi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai Ibukota Propinsi Jawa Barat, mempunyai arti yang sangat penting dan strategis, baik dipandang dari segi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup, maupun pertahanan dan keamanan, sebagai salah satu modal dasar dalam mendorong laju pertumbuhan pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Sebagian dari potensi sumber daya alam di atas secara efektif telah dimanfaatkan. Pengembangan kegiatan budidaya, baik pertanian maupun non-pertanian, telah mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Sementara, sebagian besar kawasan lindung yang masih terjaga kelestariannya berfungsi menunjang keberlangsungan pembangunan.

Prasarana dan sarana yang semakin lengkap sebagai hasil Pembangunan Jangka Panjang Pertama turut menunjang keberhasilan pembangunan. Pembangunan prasarana perangkutan turut menunjang laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Hingga tahun 1992, prasarana perhubungan di Kabupaten daerah Tingkat II Bandung meliputi jalan negara 57,935 Km,jalan propinsi 173,110 Km jalan kabupaten 339,032 Km dan jalan desa 714,776 Km. Prasarana jalan yang menghubungkan antara kota kecamatan dan antar kota kecamatan dengan desa-desa sudah cukup baik, serta dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

Pembangunan prasarana dan sarana pengairan turut menunjang keberhasilan swasembada pangan pada Pembangunan Lima Tahun Keempat dan mempertahankannya padaPembangunan Lima Tahun Kelima.

2. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung pada tahun 1993 berjumlah 3.291.158 jiwa. Laju petumbuhan penduduk pada periode 1980-1990 sebesar 2,5 % (pertumbuhan alami 1,88 % dan migrasi 0,62 %). Laju pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan periode 1971-1980 yang mencapai 3,34 %. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi terjadi di wilayah perbatasan dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dilihat dari kepadatannya penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung belum tersebar merata. Kepadatan penduduk rata-rata 1.064 jiwa/Km^2, kepadatan penduduk tertinggi sebesar 15.437 terdapat, di Kecamatan Cimahi Tengah; sedangkan kepadatan terendah sebesar 260 jiwa/Km^2 terdapat di kecamatan Pasirjambu.

Laju urbanisasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung relatif sangat tinggi baik berupa migrasi penduduk dari daerah pedesaan dan limpahan dari Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung maupun terjadinya pengkotaan wilayah desa akibat pembangunan sarana dan prasarana sosial-ekonomi yang semakin lengkap. Jumlah penduduk perkotaan pada Pelita V 40,35 % meningkat dari 4,15 % pada Pelita III dan 23,92 % pada elita IV.

Ditinjau dari struktur umur pada tahun 1992 jumlah usia kerja di Kabupaten Daerah Tingkat Bandung 2.579.063 orang atau 79,9% dari jumlah penduduk, dan yang masuk angkatan kerja 1.279.688 orang, termasuk di dalamnya tenaga kerja (yang telah bekerja) 971.284 orang. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) baru mencapai 49% dan tingkat pengangguran 3,01%.

3. Ekonomi

Selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tumbuh pesat di atas rata-rata pertumbuhan Jawa Barat seiring dengan pergeseran struktur ekonomi dan pertanian ke industri. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) rata-rata Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung pada Pelita V mencapai 9,5 % per tahun.

Pada tahun 1992 nilai PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebesar Rp 4.399.618.510.000 menurut harga berlaku atau sebesar Rp 2.175.821.350.000 berdasarkan harga konstan 1983. Andil

sektor-sektor terhadap PDRB berdasarkan harga konstan 1983 adalah sebagai berikut : sektor industri 44,48 %, sektor Pertanian 12,03 %, sektor Listrik, Gas dan Air minum 3,11 %, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 19,10 %, sektor Pertambangan dan Penggalian 0,25 % dan sektor Perangkutan dan Komunikasi 5,22 %. Pergeseran struktur ekonomi ini tidak disertai pergeseran struktur mata pencaharian penduduk. Pada tahun 1992, jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian 44,88 %, sektor industri 34,46 %, dan sektor lainnya 20,65 %.

Potensi alam, lokasinya yang strategis, serta berbagai peluang yang tercipta sebagai hasil pembangunan, menyebabkan hampir semua sektor ekonomi berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Disektor pertanian, selain pertanian sawah dan sayuran, kegiatan yang potensial adalah agrobisnis dibidang tanaman hias, buah-buahan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kegiatan industri yang layak dikembangkan adalah industri kecil dan rumah tangga serta industri yang tidak menggunakan air yang banyak dan industri yang mampu menanggulangi pencemaran lingkungan.

Sektor air minum dan listrik sangat potensial seiring dengan pesatnya pertambahan penduduk dan berkembangnya kegiatan ekonomi. Demikian pula andil sektor bangunan dan konstruksi serta sewa rumah diperkirakan akan meningkat pesat dengan meningkatnya permintaan rumah dan pesatnya pembangunan kota. Pengembangan pariwisata akan memacu pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor perangkutan dan telekomunikasi akan berkembang sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mobilitas penduduk. Sektor Pemerintahan dan Hankam akan meningkat sejalan dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat serta meningkatnya kesejahteraan aparatur. Sementara, jasa-jasa dan kegiatan penunjang lainnya diperkirakan akan berkembang seiring dengan perkembangan sektor-sektor primer dan sekunder.

4. Sosial

Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah berhasil meningkatkan taraf hidup, derajat kesehatan, dan kecerdasan masyarakat Indeks Mutu Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tahun 1992

mencapai 79,9. Angka Harapan Hidup 64,8 tahun. Angka Kematian Bayi 59 per 1000 kelahiran hidup.

Pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan tingkat pendidikan penduduk. Pada tahun 1992, Tingkat Partisipasi (*Net Enrollment Rate*) Sekolah Dasar mencapai 80 %; Angka melanjutkan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 77,78 %, meliputi 63,96 % melalui jalur sekolah dan 13,82 % melalui jalur luar sekolah, sedangkan Angka Melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas mencapai 74,86 %. Angka Melek Huruf mencapai 94 %.

Dalam kehidupan sosial, kerukunan hidup antar umat beragama di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berjalan baik. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan kemasyarakatan semakin baik. Syiar agama semakin berkembang.

Penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung pada tahun 1992/1993 mencapai 13.078 orang, terbesar (hampir 60%) dari seluruh jumlah penganut aliran kepercayaan di Jawa Barat (20.405 orang).

5. Pemerintahan

Selama Pembangunan Lima Tahun Kelima berhasil dimekarkan dari 38 kecamatan menjadi 41 kecamatan, serta penambahan 2 Wilayah Pembantu Bupati. Wilayah administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung terdiri atas 11 Wilayah Pembantu Bupati, 1 Kota Administratif (Cimahi), 41 Kecamatan, 5 Perwakilan kecamatan, 22 kelurahan dan 429 desa.

Pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung di Soreang telah berhasil meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Demikian pula, pembangunan Kantor Wilayah Pembantu Bupati dan Kecamatan telah meningkatkan dan memperlancar kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi melalui peningkatan Otonomi Daerah Tingkat II, kewenangan pangkal yang telah diserahkan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berjumlah 16 urusan, terdiri atas 11 urusan yang diserahkan bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung pada tahun 1950, serta 5 urusan yang diserahkan kemudian selama kurun

waktu Pembangunan Jangka Panjang Pertama. Kelima urusan yang diserahkan selama kurun waktu tersebut adalah : Lalulintas dan angkutan jalan; pendidikan dasar; sebagian urusan kesehatan; perkebunan dan pariwisata.

6. Pembiayaan

Pembiayaan Pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama terus meningkat Pada tahun 1993/1994, pembiayaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung mencapai Rp 110.348.616.500, meningkat dari Rp 81.356.919.070 pada tahun 1992/1993. Dari keseluruhan pembiayaan tersebut yang dikelola melalui APBD II mencapai 66,14 % atau menurun dibandingkan dengan proporsi tahun sebelumnya sebesar 76,06 %. Selama Pelita V, APBD II-nya sendiri meningkat hampir 2,5 kali lipat dari Rp 29.434.892.886 pada tahun 1989/1990 menjadi Rp 72.988.816.037 pada tahun 1993/1994. Demikian pula, Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) meningkat dari Rp 5.898.047.226 pada tahun 1989/1990 menjadi Rp 12.728.445.000 pada tahun 1993/1994, atau meningkat rata-rata sebesar 21,81% per tahun Karena jumlah bantuan pembangunan dan pemerintah yang lebih tinggi meningkat lebih besar maka proporsi PADS dalam APBD II cenderung menurun yaitu dari 20,4 % pada tahun 1989/1990 menjadi 17,4 % pada tahun 1993/1994.

Perkembangan di atas menunjukkan bahwa kebergantungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung kepada pemerintah yang lebih tinggi, khususnya Pemerintah Pusat cenderung meningkat. Demikian pula penurunan proporsi APBD II dalam pembiayaan pembangunan menunjukkan bahwa pendekatan sektoral dan sentralistik dalam pembangunan daerah masih cukup dominan.

Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) meningkat dari Rp 9.979.148.324 pada tahun 1989/1990 menjadi Rp 13.712.785.585 pada tahun 1993/1994, atau meningkat rata-rata sebesar 8,71 % pertahun. Nilai APPKD yang cukup besar tersebut menunjukkan besarnya dana pembangunan desa yang berasal dari swadaya masyarakat.

B. MAKNA DAN HAKEKAT PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Makna Pembangunan Daerah adalah pembangunan dari dan untuk masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah; dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat di daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

Pembangunan Daerah dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang pada peran serta aktif seluruh masyarakat.

Hakekat Pembangunan Daerah adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang merata secara material dan spiritual.

C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah mengisi tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kedua Jawa Barat yaitu terwujudnya masyarakat ***REPEH RAPIH KERTARAHARJA*** melalui pembentukan manusia yang ***GALEUH GALIH LUHUR-LUHUNG PARIGEL GESIT BINANGKIT***, yaitu masyarakat yang adil dan makmur dalam suasana damai dan tenteram bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikiran maju, mandiri, bernalar dan berdaya pikir tinggi kreatif, produktif, inovatif, dinamis, profesional, dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya.

D. ASAS PEMBANGUNAN DAERAH

Asas Pembangunan daerah adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Asas-asas pembangunan tersebut adalah :

1. Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ; bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan daerah dijiwai, digerakan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebaga nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik.
2. Asas Manfaat; bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan Daerah memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelestariaan fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan.
3. Asas Demokrasi Pancasila; bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan daerah dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan, melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Asas Adil dan merata; bahwa pembangunan daerah yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata disemua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yaitu seluruh masyarakat berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dharma baktinya kepada bangsa dan negara.
5. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan dalam Perikehidupan; bahwa dalam pembangunan daerah harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, material dan spintual jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, Pusat dan Daerah serta antar daerah, kepentingan perikehidupan darat, udara dan dirgantara serta kepentingan daerah, nasional dan internasional.
6. Asas Hukum ; bahwa dalam menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung masyarakat dan pemerintah harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
7. Asas Kemandirian ; bahwa dalam menyelenggarakan pembangunan Daerah, berlandaskan pada kepercayaan dan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilain-nilai luhur budaya bangsa.

8. Asas Kejuangan ; bahwa dalam menyelenggarakan serta memelihara pembangunan Daerah, masyarakat dan pemerintah harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi, yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
9. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; agar pembangunan Daerah dapat memberikan kesejahteraan lahir dan batin yang setinggi tingginya, dalam penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendorong pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya daerah.
10. Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Pembantuan ; bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah agar menganut ketiga asas tersebut secara serasi dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mendayagunakan peran serta, aspirasi, dan potensi daerah tanpa mengabaikan kepentingan dan kebijaksanaan Pusat secara serasi dan terpadu.
11. Asas Prioritas; bahwa adanya keterbatasan sumber daya, maka dalam setiap tahap pelaksanaan pembangunan akan selalu memperhatikan skala prioritas.
12. Asas Keterpaduan; bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal secara efisien dan efektif maka penyelenggaraan pembangunan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu, baik keterpaduan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian; keterpaduan antar sektor dan antara sektor dengan regional; keterpaduan pembiayaan dan penjadualan; maupun dalam bentuk koordinasi dan kerjasama antar dinas/instasi terkait dan antar daerah.

E. MATRA RUANG PEMBANGUNAN DAERAH

Matra Ruang wilayah adalah tata ruang dari Pembangunan Daerah. Tata Ruang tersebut merupakan wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang.

Penataan ruang berasaskan :

1. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

2. **Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.**

Tujuan penataan ruang adalah :

1. **Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.**
2. **Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung maupun kawasan budidaya.**
3. **Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.**

Rencana tata ruang menjadi pedoman untuk :

1. Merumuskan kebijaksanan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung serta keserasian antar sektor.
3. Penetapan lokasi investasi yang akan dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat.
4. Penyusunan pedoman rinci tata ruang.
5. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.
6. Penataan wilayah administrasi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

A. UMUM

1. Hasil-Hasil Pembangunan Jangka Panjang Pertama

Pembangunan Jangka Panjang Pertama banyak mencapai kemajuan dan berhasil meningkatkan taraf hidup serta harkat dan martabat masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Sasaran pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama dapat diwujudkan, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan struktur ekonomi yang semakin seimbang antara industri dan pertanian. Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung selama Pelita V di atas rata-rata Jawa Barat, yaitu sebesar 9,5 % per tahun. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi tersebut telah memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan dan mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Kesejahteraan rakyat makin meningkat yang tercermin dalam peningkatan kualitas kehidupannya. Indeks mutu hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tahun 1992 mencapai 79,9. Pendidikan yang diselenggarakan makin merata menjangkau seluruh lapisan masyarakat, antara lain dengan program wajib belajar pendidikan dasar. Pembangunan di bidang kesehatan serta Keluarga Berencana telah berhasil meningkatkan angka harapan hidup dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung pada periode 1980-1990 mencapai 2,5 % per tahun. Perumahan dan pemukiman yang layak telah banyak dibangun.

Dalam kehidupan sosial, kerukunan hidup antar umat beragama di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung semakin baik. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan kemasyarakatan semakin baik.

Pembangunan politik di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah berhasil memantapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan demokrasi Pancasila, sehingga dapat mendorong semakin berfungsi dan berperannya lembaga politik, mantapnya perkembangan organisasi sosial politik dan organisasi

kemasyarakatan serta suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1992.

Selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, pembangunan daerah telah berjalan lancar dan tertib, hal ini merupakan salah satu ciri terpeliharanya stabilitas daerah dan terwujudnya kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

2. Masalah-Masalah Pokok yang Belum Terselesaikan pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama

Di samping berbagai keberhasilan, terdapat pula beberapa masalah yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama. Masalah-masalah yang belum terselesaikan tersebut antara lain :

a. Masalah Mutu Sumber Daya Manusia

Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia dirasakan masih belum memadai serta pendayagunaannya belum optimal. Angka melanjutkan sekolah relatif masih rendah. Pembinaan anak, remaja, dan generasi muda relatif masih lemah. Sementara itu, kecenderungan ekonomi global dan kemajuan teknologi menuntut peningkatan keterampilan, kemampuan, wawasan, kreativitas, daya inovasi serta kemandirian, dan ketangguhan masyarakat. Seiring dengan itu, makin terbukanya informasi dan kuatnya pengaruh dari luar negeri akan makin melonggarkan sistem nilai dan norma masyarakat. Menurunnya ketaatan terhadap norma-norma agama dan penyimpangan terhadap norma-norma susila diperkirakan akan semakin bertambah.

b. Masalah Pendayagunaan Aparatur Pemerintah

Kemampuan dan pendayagunaan aparatur pemerintah masih terbatas, organisasi dan sistem pelayanan administrasi belum seimbang dengan banyaknya penduduk dan luas wilayah, serta sarana dan prasarana pemerintahan masih terbatas. Di pihak lain, penduduk yang semakin kritis dan dinamis yang disertai dengan kesadaran hukum yang semakin tinggi menuntut pemerintahan yang semakin bersih dan berwibawa yang ditunjang dengan peningkatan pelayanan dan kemampuan aparatur pemerintah.

c. Masalah Ketenagakerjaan

Perluasan kesempatan kerja belum seimbang dengan pertambahan angkatan kerja; tingkat keterampilan dan produktivitas angkatan kerja masih rendah ; mekanisme pasar kerja belum lancar ; koordinasi perencanaan penempatan tenaga kerja dan latihan keterampilan tenaga kerja masih kurang efektif.

d. Masalah Pengembangan Lembaga Ekonomi Rakyat

Lembaga ekonomi rakyat, khususnya koperasi, belum berkembang dan berfungsi secara optimal; kemitraan usaha belum terwujud dengan baik; pengusaha golongan ekonomi lemah masih perlu dibina dan dibantu; distribusi kegiatan ekonomi belum merata. Pergeseran struktur ekonomi dari pertanian ke industri serta laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya diikuti dengan pergeseran struktur mata pencaharian dan peningkatan peran lembaga ekonomi rakyat.

e. Masalah Desa Tertinggal dan Penduduk Miskin

Masih terdapat desa tertinggal dan penduduk miskin. Kesenjangan sosial ekonomi yang semakin lebar akan berpengaruh negatif terhadap kestabilan politik dan keamanan. Ketimpangan di dalam kesempatan berusaha dan kesempatan-kesempatan lainnya akibat ketidakberdayaan penduduk lapisan bawah (miskin) akan meningkatkan kecemburuan sosial yang apabila dibiarkan akan menjurus pada keresahan sosial.

f. Masalah Lingkungan Hidup

Daya dukung sumber daya alam menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan daya dukung sumber daya alam menyebabkan terjadinya ancaman bahaya longsor dan banjir. Pemanfaatan potensi sumber daya alam, usaha pelestarian lingkungan, serta pengendalian pencemaran lingkungan belum efektif.

g. Masalah Penataan Ruang

Penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan/pelaksanaan dan pengendalian tata ruang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung relatif masih lemah. Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya didayagunakan sebagai pedoman dan alat pengendali pembangunan.

h. Masalah Pembangunan dan Pengelolaan Kota

Pembangunan dan pengelolaan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung belum mampu mengejar, menunjang dan mengendalikan pesatnya pertumbuhan kota.

i. Masalah Perumahan dan Permukiman

Seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, maka kebutuhan akan rumah pun meningkat dengan pesat, terutama diperkotaan. Banyak kendala dan masalah di dalam penyediaan rumah dan pembangunan permukiman. Sistem pembangunan perumahan belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah dan/atau tidak tetap. Lokasi yang tidak sesuai, harga lahan yang semakin tinggi serta harga bahan bangunan yang semakin mahal merupakan kendala di dalam penyediaan rumah sederhana yang layak huni. Sementara, harga jual rumah serta sistem pembiayaan yang berlaku sulit dijangkau oleh penduduk berpenghasilan rendah dan/atau tidak tetap.

j. Masalah Sistem Informasi Pembangunan

Belum ada Sistem Informasi Pembangunan yang terpadu dan menyeluruh serta berjalan secara efektif sehingga data dan informasi yang tersedia kurang lengkap dan akurat serta kadaluwarsa. Banyak kebijaksanaan yang disusun dan ditetapkan tidak didasarkan atas data/informasi yang tepat dan akurat. Akibatnya, sering terjadi kebijaksanaan atau rencana sulit dilaksanakan atau apabila dilaksanakan menimbulkan gejolak di masyarakat.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah mengisi tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kedua Jawa Barat yaitu terwujudnya masyarakat *REPEH RAPIH KERTARAHARJA* melalui pembentukan manusia yang *GALEUH GALIH LUHUR-LUHUNG PARIGEL GESIT BINANGKIT*, yaitu masyarakat yang adil dan makmur dalam suasana damai dan tenteram bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikiran maju, mandiri, bernalar dan berdaya pikir tinggi, kreatif, produktif, inovatif, dinamis, profesional dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya.

C. SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

1. Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua

Untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung maka sasaran umum pembangunan jangka panjang kedua adalah sebagai berikut :

a. Terpenuhinya kebutuhan penduduk, baik kebutuhan fisik, psikologis dan sosial serta kebutuhan akan penghargaan (esteem needs) dan pengembangan diri (self actualization).

b. Tingginya taraf dan kualitas hidup masyarakat seiring dengan semakin tingginya pendapatan nyata secara lebih merata.

c. Terciptanya keadilan, ketentraman, kedamaian dan kerukunan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang serasi dan seimbang.

d. Tingginya tingkat pendidikan, kecerdasan (daya pikir dan daya nalar), keterampilan, daya inovasi dan kreatifitas masyarakat.

e. Tingginya produktivitas dan jiwa kewirausahaan masyarakat yang didukung oleh penguasaan IPTEK secara lebih dinamis.

f. Tingginya kemandirian dan peranan masyarakat dalam pembangunan yang berkesinambungan.

g. Semakin berkembangnya kehidupan keagamaan yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kerukunan beragama yang semakin baik.

2. Sasaran Bidang Pembangunan Jangka Panjang Kedua

Kondisi masyarakat yang hendak diwujudkan sebagai sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran menurut bidang pembangunan sebagai berikut :

a. Sasaran Bidang Ekonomi

1) Terciptanya perekonomian daerah yang semakin mandiri dan handal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Terwujudnya kemitraan usaha yang kokoh antara badan usaha koperasi, swasta serta badan usaha milik negara/daerah.

2) Meningkatnya kemakmuran rakyat yang makin merata, se-

iring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil, bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh, koperasi yang sehat dan kuat serta perdagangan dan jasa yang maju/berkembang.

3) Semakin optimalnya pendayagunaan sumber daya alam yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maju, produktif, dan profesional.

4) Meningkatnya pemanfaatan, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju penggunaan sumber daya alam yang efisien dan pemeliharaan lingkungan hidup.

5) Terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang luas.

b. **Sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan**

1) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang makin sejahtera lahir batin secara adil dan merata.

2) Terwujudnya manusia yang cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif, profesional dan tangguh.

3) Meningkatnya ketahanan budaya serta makin berkembangannya sistem nilai yang menunjang pembangunan.

4) Terwujudnya jaminan sosial bagi anak yatim, anak terlantar, penduduk lanjut usia dan tenaga kerja (buruh).

5) Tertanggulanginya masalah-masalah sosial lainnya.

6) Berkembangnya kesenian dan budaya daerah yang menunjang pengembangan pariwisata dan budaya nasional.

7) Meningkatnya indeks kualitas fisik kehidupan masyarakat (Physical Quality Life Index).

8) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

c. **Sasaran Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

1) Terwujudnya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur.

2) Terciptanya suasana kehidupan dan kerukunan beragama

yang harmonis, baik sesama umat beragama, maupun antar umat beragama.

3) Makin kuatnya landasan spiritual dan moral untuk mendukung pembangunan daerah dalam suasana kehidupan yang dinamis.

4) Kokohnya persatuan dan kesatuan yang selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

5) Terhindarnya pengembangan aliran kepercayaan yang mengarah pada pembentukan agama baru.

d. Sasaran Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan, penguasaan, serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2) Meningkatnya muatan/peranan Ilmu Pengetahuan dan Tekonologi dalam pembangunan.

e. Sasaran Bidang Hukum

1) Terjaminnya kepastian hukum

2) Meningkatnya kualitas aparatur hukum serta sarana dan prasarana yang memadai.

3) Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.

4) Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang berorientasi ke masa depan.

f. Sasaran Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

1) Terciptanya dan berfungsinya tatanan kehidupan politik yang konsitusional berdasarkan Demokrasi Pancasila yang mantap dan dinamis.

2) Meningkatnya kesadaran dan etika mayarakat dalam bidang politik.

3) Terwujudnya masyarakat hukum yang bersikap dan berperilaku sesuai dengan budaya politik Pancasila.

4) Mantapnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

5) Terwujudnya proses pembauran yang sesuai dengan Pancasila.

6) Meningkatnya Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

7) Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, profesional dan penuh pengabdian kepada masyarakat.

8) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat serta efektifnya penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

9) Makin efektifnya penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan peran serta masyarakat pembangunan, dalam upaya menangkal pengaruh negatif dari luar serta dalam rangka mengembangkan budaya daerah yang positif.

10) Makin meningkat dan lancarnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan keselarasan antara masyarakat dan kebijaksanaan pemerintah.

g. Sasaran Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1) Terwujudnya wilayah dan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebagai ruang juang, alat juang dan kondisi juang dalam Sishankamrata.

2) Terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinamis.

3) Makin meningkatnya kesadaran bela negara.

4) Semakin mantapnya kemanunggalan ABRI dengan rakyat.

D. TITIK BERAT PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diletakkan pada bidang ekonomi sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan dengan bidang-bidang lainnya.

E. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan kepada peningkatan mutu dan pendayagunaannya untuk mewujudkan manusia yang maju, mandiri dan sejahtera, yaitu manusia yang berwatak baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif, dinamis, profesional, tangguh berjiwa kewirausahaan tinggi, serta sejahtera lahir dan batin. Untuk itu maka pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, agama, sosial-budaya, ketenagakerjaan, serta pembinaan anak, remaja, dan pemuda, berikut bidang/sektor penunjang akan lebih ditingkatkan.

2. Pembangunan Ekonomi

   Pembangunan ekonomi pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan pendapat nyata masyarakat, mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi serta menciptakan perekonomian yang mandiri, kokoh dan handal, melalui pengembangan ekonomi rakyat. Dalam kerangka ini maka usaha kecil dan tradisional, golongan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi mendapat perhatian utama. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat akan diusahakan semakin sehat, tangguh, kuat dan mandiri. Fungsi dan peran BUMN/BUMD, koperasi dan swasta akan terus ditata dan dikembangkan secara serasi dan seimbang bersamaan dengan pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat, berdasarkan demokrasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan ditempuh melalui peningkatan produktivitas, efisiensi dan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan industri diarahkan kepada industri yang memiliki keunggulan kompetitif (competitive advantage), nilai tambah tinggi, padat keterampilan dan bermutu tinggi; serta efisien dalam penggunaan sumber daya alam dan tidak mencemari lingkungan. Pengembangan pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, mendukung pengembangan industri serta berorientasi ekspor. Sektor jasa dikembangkan untuk mendukung sektor produksi dan perdagangan. Pembangunan sektor jasa meliputi infrastruktur dan keuangan, terutama pengembangan jaringan informasi, perhubungan, perdagangan dan jasa keuangan.

3. Pembangunan berkelanjutan

   Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Kabupaten Daerah .....

Tingkat II Bandung masih bertumpu pada pertumbuhan ekonomi seiring dengan upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan, maka dasar-dasar pertumbuhan harus di perkuat. Partisipasi masyarakat terus ditingkatkan. Pendayagunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan/daya dukung untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusakan dan pencemaran lingkungan perlu terus dikendalikan secara lebih ketat. Pemanfaatan ruang diatur dan didasarkan pada rencana tata ruang.

4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

   Pemanfaatan, pengembangan dan pengusaan IPTEK diarahkan untuk mempercepat peningkatan kecerdasan dan kemampuan masyarakat, mempercepat proses pembaharuan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperluas lapangan kerja, memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan, pengembangan, penguasaan IPTEK harus berpedoman kepada nilai-nilai agama dan budaya tinggi masyarakat serta memperhatikan keterbatasan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Peningkatan Kemampuan Otonomi Daerah

   Peningkatan Kemampuan Otonomi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat serta meningkatkan keefektifan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Peningkatan kemampuan Otonomi Daerah akan dilaksanakan melalui penataan/pengembangan daerah/wilayah administratif, penataan/pengembangan kelembagaan serta pendayagunaan aparatur pemerintah.

6. Pembiayaan Pembangunan

   Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diarahkan pada upaya peningkatan peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, peningkatan peranan PADS dalam pembiayaan pembangunan, serta peningkatan efisiensi dan keefektifan pemanfaatan dana.

F. ARAH PENATAAN RUANG DAERAH

1. Kedudukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Dalam Lingkup Jawa Barat

Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung merupakan bagian dari wilayah Metropolitan Bandung sebagai Ibukota Propinsi Jawa Barat dan pusat pengembangan di bawah pusat utama Jakarta (Jabotabek). Wilayah ini juga merupakan bagian dari mega urban yang cenderung tumbuh pesat sepanjang koridor Barat Timur dari Merak hingga Cirebon serta koridor Cikampek-Bandung. Di dalam sistem perkotaan Jawa Barat, Kota Bandung merupakan kota hierarki IIA yang berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi, dengan kegiatan utamanya : industri, permukiman dan perdagangan regional. Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung merupakan wilayah belakangnya yang berfungsi sebagai penyangga dan penyeimbang Kota Bandung dalam satu sistem Metropolitan Bandung.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, sebagai sumber air baku untuk irigasi dan air bersih serta energi listrik yang sangat vital dilihat dari kepentingan nasional maupun regional. Tanahnya yang subur dan panorama alamnya yang indah telah menjadikan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebagai salah satu pemasok beras dan sayuran untuk tingkat nasional serta sebagai daerah tujuan wisata. Balai-balai penelitian pertanian terdapat di wilayah ini. Di samping kegiatan pertanian, kegiatan industri juga telah lama tumbuh. Ekspor tekstil dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung mencapai 70% ekspor nasional.

Berdasarkan potensi, peran dan kedudukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, baik dalam lingkup nasional maupun regional, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diarahkan untuk dapat berfungsi sebagai:

a. Daerah pengembangan industri
b. Daerah pengembangan permukiman dan perkotaan
c. Daerah pengembangan pertanian
d. Daerah lindung
e. Daerah pengembangan pariwisata.

f. Daerah pendidikan dan latihan ABRI

2. Kebijaksanaan Perencanaan Tata Ruang

a. Penggalakan peningkatan dan pemantapan perencanaan tata ruang.

b. Peningkatan kualitas rencana tata ruang

c. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

d. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Daerah Tingkat II yang berbatasan dalam tata ruang.

3. Kebijaksanaan Pemanfaatan Ruang

a. Pemantapan Kawasan Lindung

1) Kawasan Lindung yang dimaksud meliputi: kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air yang memberikan perlindungan daerah bawahannya; kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau dan kawasan sekitar mata air); serta taman hutan raya.

2) Penetapan kawasan lindung ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, kendala dan permasalahan nyata di lapangan.

3) Mengingat fungsi dan potensi lindung serta permasalahan, kendala dan perkembangan di setiap kawasan lindung tidak sama, maka kawasan lindung perlu dibedakan atas kawasan lindung mutlak dan kawasan lindung terbatas.

4) Pada kawasan lindung mutlak tidak diperbolehkan ada kegiatan dan bangunan selain upaya untuk memelihara dan meningkatkan fungsi lindung atau untuk kepentingan nasional yang strategis dengan persyaratan ketat agar tidak merusak fungsi lindung. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan ini sejauh tidak mengganggu terhadap keseimbangan dan kelestarian alam dan lingkungan, masih dapat dipertahankan. Perkembangan kegiatan budidaya di kawasan tersebut mutlak harus dikendalikan dan/atau dihentikan.

5) Pada kawasan lindung terbatas berlaku ketentuan sebagai berikut :

a) Peningkatan fungsi lindung bagi penggunaan yang telah sesuai serta pencegahan penurunan fungsi lindung.

b) Peningkatan daya dukung tanah dan kualitas lingkungan serta rahabilitasi tanah dengan pola penggunaan lahan yang sesuai dengan fungsi lindung.

c) Bagi penggunaan lahan yang tidak sesuai, namun untuk mempertahankan fungsi lindung masih dapat diatasi dengan teknologi, maka penggunaan tersebut masih dapat dipertahankan sepanjang teknologi tersebut tetap diterapkan.

d) Bagi penggunaan yang tidak sesuai dan tidak mungkin dilakukan upaya untuk mempertahankan fungsi lindung, maka kegiatan/penggunaan lahan tersebut dihentikan/ dipindahkan.

b. Pemanfaatan Kawasan Budidaya

1) Peningkatan optimasi, efisiensi dan keefektifan pemanfaatan tata ruang kawasan budidaya.

2) Kawasan budidaya serta penggunaan lahannya ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten.

3) Pengembangan budidaya pertanian serta perlindungan, pemeliharaan dan perluasan areal persawahan berpengairan teknis, terutama di daerah pedesaan yang tidak termasuk wilayah rencana pengembangan kota dan kawasan strategis lainnya serta di luar kawasan lindung.

4) Pengembangan perumahan/permukiman diarahkan pada lahan yang direncanakan untuk pengembangan kota dan kawasan permukiman serta harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah memiliki kekuatan hukum.

5) Pembangunan dan pengembangan kota sesuai dengan peran, fungsi dan hierarkinya.

6) Pengembangan industri diarahkan untuk mengisi zone-zone dan kawasan industri yang telah ditentukan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Pengembangan industri di luar zone dan kawasan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tidak diperkenankan.

7) Kawasan pertambangan, khususnya Golongan C, dialokasikan di Kecamatan Batujajar, Padalarang, dan Cipatat serta di daerah lain yang diperkirakan tidak menimbulkan kerusakan/bencana alam. Kawasan ini, setelah habis deposit bahan tambangnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang.

8) Kawasan pariwisata, khususnya agrowisata, wanawisata dan wisata air, dikembangkan di kawasan budidaya lahan kering, kawasan lindung terbatas dan kawasan perairan, sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

9) Integrasi kawasan pendidikan dan latihan serta fasilitas ABRI lainnya ke dalam tata ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

4. Kebijaksanaan Pengendalian Tata Ruang

a. Peningkatan kegiatan pemantauan dalan rangka pengendalian perkembangan tata ruang.

b. Pengendalian/pembatasan pertumbuhan kawasan terbangun di wilayah yang berfungsi lindung, kawasan pertanian berpengairan sepanjang tahun, kawasan pertanian lahan kering yang memiliki tingkat kesuburan tinggi, kawasan yang dicadangkan untuk kegiatan strategis serta kawasan-kawasan yang mengandung bahan tambang/sumber daya mineral dalam jumlah besar, kecuali wilayah/kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah pengembangan kota atau kawasan terbangun berdasarkan rencana tata ruang yang telah berkekuatan hukum.

c. Peningkatan permasyarakatan rencana tata ruang serta penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap rencana tata ruang.

BAB IV

PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

A. UMUM

Secara umum pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Kelima di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah mencapai hasil yang menggembirakan. Sasaran-sasaran pembangunan yang dijabarkan ke dalam kebijaksanaan strategis sebagai arah dan kebijaksanaan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Daerah, telah berhasil meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, telah meningkatkan permintaan atau tuntutan masyarakat yang lebih tinggi. Keberhasilan yang telah dicapai dapat dijadikan sebagai kerangka landasan bagi Pembangunan Lima Tahun Keenam sebagai tahap awal proses tinggal landas.

Beberapa keberhasilan serta kemajuan yang telah dicapai dalam Pembangunan Lima Tahun Kelima Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung antara lain :

1. Kualitas sumber daya manusia menunjukkan adanya peningkatan, yang ditandai dengan makin meningkatnya kualitas hidup secara fisik, perikehidupan sosial dan budaya daerah berkembang, kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin mantap serta tumbuh dan berkembangnya semangat masyarakat untuk membangun.
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung relatif tinggi dan stabil di atas pertumbuhan rata-rata Jawa Barat, disertai dengan pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Peranan koperasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat, terutama KUD di perdesaan terus meningkat.
3. Berkembangnya kegiatan ekonomi di perdesaan telah menyerap sebagian tenaga kerja, terutama dalam kegiatan agroindustri, industri kerajinan dan pertanian.
4. Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah makin meningkat, seiring dengan meningkatnya kemampuan aparatur dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
5. Kesadaran masyarakat akan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat. Lahan kritis berkurang, program K3

semakin memasyarakat.

6. Pembangunan Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung di Kota Soreang berjalan lancar. Fasilitas perkantoran semakin lengkap. Kegiatan sosial ekonomi masyarakat terus tumbuh seiring dengan peningkatan kegiatan pemerintahan.
7. Pembangunan pertanian telah berhasil memantapkan swasembada pangan dan mendorong pengembangan agrobisnis dan agroindustri.
8. Gerakan Keluarga Berencana berjalan efektif. Laju pertumbuhan penduduk alami menurun. Jumlah akseptor meningkat.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Kelima terdapat beberapa **masalah pokok** yang belum terselesaikan dan perlu segera diupayakan pemecahannya dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah, antara lain :

1. Masalah Mutu Sumber Daya Manusia

   Mutu sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan, baik tingkat pendidikan, keterampilan, kesehatan, produktivitas, kemandirian maupun disiplinnya.

2. Masalah Pendayagunaan Aparatur Pemerintah

   Pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kemampuan, disiplin, kerja dan kesejahteraan aparatur relatif masih rendah. Sistem pembinaan karier pegawai belum mapan dan kurang menunjang peningkatan prestasi. Organisasi dan tata laksana pemerintahan masih belum optimal dan perlu dikembangkan/dibenahi. Wilayah administrasi pemerintahan perlu ditata kembali serta disesuaikan dengan perkembangan. Sarana dan prasarana pemerintahan belum memadai.

3. Masalah Ketenagakerjaan

   Perluasan kesempatan kerja belum seimbang dengan pertambahan angkatan kerja; tingkat keterampilan dan produktivitas angkatan kerja masih rendah; mekanisme pasar kerja belum lancar; koordinasi perencanaan penempatan tenaga kerja dan latihan keterampilan tenaga kerja masih kurang efektif.

4. Masalah Pengembangan Lembaga Ekonomi Rakyat

   Lembaga ekonomi rakyat, khususnya koperasi, belum berkembang

dan berfungsi secara optimal; kemitraan usaha belum terwujud dengan baik; pengusaha golongan ekonomi lemah masih perlu dibina dan dibantu.

5. Masalah desa tertinggal dan penduduk miskin

   Masih terdapat desa tertinggal dan penduduk miskin yang kurang terjangkau/kurang mendapat kesempatan dalam pembangunan. Akibatnya terjadi ketimpangan antar wilayah dan antar golongan sosial-ekonomi.

6. Masalah Lingkungan Hidup

   Potensi sumber daya alam belum dimanfaatkan secara optimal, seimbang dan terkendali. Pencemaran dan kerusakan lingkungan terus berlangsung. Keseimbangan tata air terganggu akibat eksploitasi yang kurang terkendali serta berkurangnya peresapan air.

7. Masalah lalu-lintas

   Seiring dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan mobilitas penduduk, volume lalu-lintas semakin tinggi. Kemacetan lalu-lintas terjadi di setiap kota serta jalur-jalur jalan regional, terutama yang menuju/dari kota Bandung.

8. Masalah Alih Fungsi Lahan

   Alih fungsi lahan, baik persawahan maupun kawasan pertanian lahan kering menjadi kawasan terbangun diperkirakan akan mengurangi kemantapan peningkatan produksi pertanian, khususnya beras dan hortikultura (sayuran).

9. Masalah Penataan Ruang

   Penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan/pelaksanaan dan pengendalian tata ruang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung relatif masih lemah. Belum seluruh wilayah dan kota memiliki rencana tata ruang yang memadai dan berkekuatan hukum. Pelaksanaan dan pengendaliannya pun relatif masih lemah, sehingga timbul berbagai masalah seperti : Kerusakan alam, pencemaran lingkungan serta berbagai kongesti dan inefisiensi.

10. Masalah Pembangunan dan Pengelolaan Kota

    Pembangunan dan pengelolaan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung belum mampu mengejar, menunjang dan me-

ngendalikan pesatnya pertumbuhan kota. Kemacetan lalulintas, rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana serta belum efektifnya penggalian sumber pendapatan kota, merupakan beberapa tantangan di dalam pembangunan dan pengelolaan kota.

11. Masalah Perumahan dan Permukiman

    Seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, maka kebutuhan akan rumah pun meningkat dengan pesat, terutama di perkotaan. Dikaitkan dengan kebutuhan yang belum terpenuhi, maka jumlah rumah yang harus dibangun setiap tahunnya semakin banyak. Harga rumah sangat sederhana cenderung meningkat dan semakin tidak terjangkau oleh penduduk berpenghasilan rendah dan/atau tidak tetap. Luasnya semakin sempit dan kualitas bangunannya semakin rendah serta lokasinya semakin jauh dari tempat pekerjaan. Di sisi lain, tingkat keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah/tidak tetap untuk memiliki rumah semakin berkurang. Sementara sistem penyediaan kredit dan kelembagaan penyediaan perumahan belum mampu menjangkau masyarakat kelompok ini.

12. Masalah Sistem Informasi Pembangunan

    Data dan informasi mengenai kondisi Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tidak lengkap, akurat dan aktual, sehingga sasaran, kebijaksanaan dan rencana yang dibuat/ditetapkan seringkali kurang sesuai dengan kondisi, potensi, permasalahan dan/atau kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sistem informasi yang handal, terpadu dan menyeluruh. Permasalahan sistem informasi yang dihadapi menyangkut aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sistem (piranti lunak) serta dukungan sarana dan prasananya.

Selain masalah-masalah pokok di atas, masih dijumpai kendala-kendala sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi, baik secara alami maupun migrasi serta persebarannya tidak merata.
2. Dana Pembangunan relatif sangat terbatas dibandingkan dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi.
3. Keterbatasan sumber daya air sehingga terjadi konflik dalam penyediaan air baku bagi penyediaan air bersih domestik, industri dan irigasi.

4. Topografi yang berbukit-bukit dan berlereng curam serta banyaknya wilayah rawan gerakan tanah menjadi pembatasan perkembangan.

Di samping permasalahan dan kendala di atas, terdapat beberapa keadaan yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk melaksanakan Pembangunan Lima Tahun Keenam, antara lain:

1. Mantapnya kestabilan sosial, politik, dan keamanan.
2. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan terus meningkat.
3. Peranan usaha swasta dan koperasi menunjukkan potensi mampu meningkatkan kesempatan kerja.
4. Pesatnya perkembangan sarana dan prasarana transportasi serta jasa telekomunikasi mendukung pengembangan perekonomian.
5. Letak dan kedudukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebagai penyangga Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat serta bagian dari wilayah metropolitan Bandung merupakan potensi yang strategis bagi pembangunan Daerah.
6. Banyaknya lembaga-lembaga pendidikan tinggi, penelitian serta industri strategis di Kotamadya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dapat dimanfaatkan untuk memacu pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Daerah tingkat II Bandung.
7. Panorama alam yang indah sangat potensial untuk pengembangan pariwisata.
8. Tanah yang subur serta banyaknya tambang golongan C merupakan salah satu modal dasar pembangunan.

Hasil-hasil Pembangunan Lima Tahun Kelima dan peluang yang ada perlu dikonsolidikasikan untuk memecahkan permasalahan dan mengatasi kendala yang masih dihadapi pada masa Pembangunan Lima Tahun Keenam serta memantapkan dasar-dasar pertumbuhan pembangunan sehingga pembangunan pada tahap-tahap berikutnya dapat berjalan secara berkesinambungan.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

1. Meningkatkan kecerdasan, kemandirian, taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat secara adil dan merata.

2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya secara kebih terkoordinasikan, menyeluruh dan terpadu.

C. SASARAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

1. Sasaran Umum Pembangunan Lima Tahun Keenam

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di atas, sasaran umum Pembangunan Lima Tahun Keenam adalah:

a. Meningkatnya pendapatan nyata serta terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara layak.

b. Tumbuhnya kemandirian dan produktivitas manusia dan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang semakin maju.

c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.

d. Meningkatnya ketahanan ekonomi daerah serta terciptanya iklim yang menunjang pengembangan usaha.

e. Meningkatnya ketahanan budaya serta berkembangnya budaya tinggi masyarakat.

f. Terciptanya keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

g. Terciptanya dasar-dasar yang kokoh bagi pertumbuhan pembangunan secara berkelanjutan.

2. Sasaran Bidang Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah

a. Sasaran Bidang Ekonomi

1) Berkembangnya kegiatan ekonomi yang mempunyai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang tinggi.

2) Meningkatnya perekonomian rakyat, kesempatan berusaha, dan lapangan kerja.

3) Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian daerah sejajar dengan usaha swasta dan usaha negara/daerah.

4) Terwujudnya kemitraan usaha yang kokoh, baik antara badan usaha koperasi, swasta dan BUMN/BUMD maupun antara usaha besar, menengah dan kecil.

5) Terciptanya iklim usaha yang menunjang pengembangan kegiatan industri yang efisien dan tangguh.

6. Berkembangnya industri rakyat yang tangguh dan berorientasi pasar (ekspor).
7. Meningkatnya kandungan/komponen lokal dalam proses produksi.
8. Terciptanya tata ruang industri yang serasi dan sesuai dengan rencana tata ruang.
9) Terpeliharanya lahan-lahan pertanian produktif.
10) Berkembangnya agroindustri dan agrobisnis.
11) Meningkatnya kesejahteraan petani.
12) Terciptanya pola usaha tani yang berorientasi pasar.
13) Meningkatnya peran dan andil sektor pariwisata dalam perekonomian daerah.
14) Terciptanya sistim tata niaga yang handal, efisien dan afektif.
15) Meningkatnya peranan dan pelayanan lembaga keuangan di daerah.
16) Tersedianya prasarana (telekominikasi, transportasi, listrik/ energi dan prasarana dasar lingkungan).
17) Terkendalinya penggunaan dan keseimbangan Sumber Daya alam serta terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
18) Tersedianya tenaga kerja tyang terampil, produktif, maju dan profesional sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
19) Terwujudnya pemanfaatan teknologi tepat guna di dalam penggunaan Sumber Daya Alam dan pemeliharaan lingkungan secara efisien dan efektif.
20) Meningkatnya efisiensi dan keefektifan investasi pemerintah dalam pembangunan.
21) Meningkatnya proporsi investasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan.
22) Meningkatnya proporsi PADS dalam pembiayaan pembangunan daerah.

b. Sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan

1) Meningkatnya kemandirian, etos kerja, kecerdasan, budi pekerti, keimanan dan ketakwaan masyarakat.
2) Meningkatnya pendapatan nyata masyarakat.
3) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
4) Makin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan dan papan yang layak secara memadai.
5) Makin tersedianya pekerjaan yang layak.
6) Tertanggulanginya penduduk miskin dan desa tertinggal.
7) Terciptanya ketentraman bagi masyarakat.
8) Terselenggaranya pendidikan prasekolah yang semakin merata dan bermutu.
9) Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, disertai dengan meningkatnya kualitas guru dan/atau tenaga pendidikan lainnya.
10) Meningkatnya jumlah, ragam dan mutu pendidikan kejuruan sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
11) Berkurangnya sikap dan budaya feodalistik.
12) Tumbuhnya kesetiakawanan sosial dalam kehidupan masyarakat.
13) Meningkatnya kemampuan Pemerintah dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial.
14) Makin efektifnya perlindungan terhadap tenaga kerja.
15) Berkembangnya kesenian dan budaya daerah yang menunjang pengembangan pariwisata.
16) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.
17) Makin memasyarakatnya budaya hidup sehat.
18) Meningkatnya prestasi olahraga.

c. Sasaran Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

1) Meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, disertai pengamalannya dalam kehidupan sehari-

hari.

2) Makin meningkatnya kerukunan umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.
3) Meningkatnya pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4) Meningkatnya peranan, jumlah dan kualitas pendakwah agama.
5) Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dan peribadatan bagi umat beragama secara menyeluruh dan merata.
6) Meningkatnya pelayanan serta kelancaran ibadah haji dan umroh.

d. Sasaran Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1) Meningkatnya pemanfaatan dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terutama teknologi tepat guna.
2) Berkembangnya teknologi tepat guna yang mampu memberikan peluang kesempatan kerja baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di perdesaan.
3) Meningkatnya pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam proses produksi.
4) Tersedianya informasi yang semakin mudah, murah dan lengkap.

e. Sasaran Bidang Hukum

1) Meningkatnya pembinaan, penegakan, pelayanan, dan bantuan hukum kepada masyarakat.
2) Terwujudnya produk hukum yang mampu mengamankan dan mendukung pembangunan daerah serta sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
3) Terwujudnya aparatur hukum yang makin profesional, bersih dan berwibawa.
4) Tersedianya sarana dan prasarana hukum yang lebih memadai.
5) Meningkatnya kesadaran, ketaatan dan disiplin masyarakat

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Sasaran Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa

1) Berkembangnya budaya politik Pancasila yang mengarah pada perwujudan sikap keterbukaan yang bertanggung jawab.
2) Meningkatnya komunikasi timbal balik antara pemerintah, organisasi sosial-politik dan masyarakat.
3) Makin meningkatnya kualitas dan kemandirian organisasi sosial politik.
4) Mantapnya pembinaan terhadap pelakasanaan pembauran yang dijiwai kesetiakawanan sosial.
5) Makin mantapnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.
6) Terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang semakin efektif dan efisien.
7) Meningkatnya kemampuan teknis fungsional dan manajerial, disiplin, dedikasi dan kesejahteraan aparatur pemerintah seiring dengan makin terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
8) Semakin mantapnya pola jejang karier pegawai.
9) Terlaksananya penataan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta tertib administrasi Pemerintahan.
10) Terlaksananya penataan wilayah administrasi, baik tingkat desa/kelurahan, kecamatan, wilayah Pembantu Bupati, maupun wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam arah Pembangunan Jangka Panjang Kedua.
11) Meningkatnya Otonomi Daerah Tingkat II yang makin nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.
12) Makin efektif dan meluasnya penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan kecerdasan, wawasan dan pengetahuan masyarakat, makin kuatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh luar yang negatif serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.

g. Sasaran Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1) Makin mantapnya keamanan, ketentraman dan ketertiban.
2) Meningkatnya kesadaran bela negara serta peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3) Meningkatnya jumlah dan kualitas rakyat terlatih serta makin efektifnya perlindungan masyarakat.
4) Makin mantapnya kemanunggalan ABRI dengan rakyat.

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

Prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah peningkatan mutu dan pendayagunaan sumber daya manusia, peningkatan mutu dan pendayagunaan aparatur pemerintah, pembangunan prasarana ekonomi, pengembangan perekonomian rakyat serta pemantapan penataan ruang, dalam rangka memantapkan ketahanan ekonomi dan menciptakan iklim yang menunjang pengembangan usaha, sebagai dasar bagi tumbuhnya pembangunan secara berkesinambungan.

E. KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran Pembangunan Lima Tahun Keenam, selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta sebagai antisipasi terhadap perkembangan dan tantangan di masa yang akan datang, dengan memperhatikan permasalahan, kendala, dan peluang yang dihadapi, maka arah kebijaksanaan strategis untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kebijaksanaan Umum Pembangunan Lima Tahun Keenam

a. Peningkatan mutu sumber daya manusia.
b. Peningkatan pendayagunaan aparatur Pemerintah di Daerah.
c. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha, terutama di pedesaan.
d. Perluasan dan pengembangan lembaga-lembaga ekonomi, terutama koperasi.

e. Pengentasan kemiskinan

f. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

g. Pemantapan penataan ruang.

h. Pembangunan kota.

i. Pembangunan perumahan dan permukiman.

j. Pengembangan dan pemantapan sistem informasi pembangunan.

Sebagai subjek pembangunan, sumber daya manusia merupakan modal dasar utama. Kualitas manusia yang tinggi merupakan prasarat untuk mencapai tinggal landas pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua. Kesejahteraan masyarakat akan diwujudkan seiring dengan peningkatan produktivitas, daya nalar, kreativitas, daya inovasi, kemandirian, profesionalisme, kewiraswastaan, akhlak, moral dan ketakwaan serta kesehatan dan kebugarannya.

Peningkatan mutu sumber daya manusia tersebut akan ditempuh melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, peningkatan penghayatan dan pelaksanaan ajaran agama, pembinaan anak, remaja dan generasi muda. Selaras dengan asas desentralisasi dan peningkatan Otonomi Daerah Tingkat II, serta untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat, maka pelayanan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan. Peningkatan pendayagunaan aparatur pemerintah didaerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintah pada Pelita VI. Langkah tersebut mencakup peningkatan mutu dan kinerja aparatur negara, pengembangan/ penataan kelembagaan/organisasi dan ketatalaksanaan, penyediaan sarana dan prasarana kerja yang layak dan memadai, penataran dan pengembangan wilayah administrasi pemerintahan serta peningkatan dan pendayagunaan pendapatan daerah.

Untuk mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, maka kesempatan kerja dan berusaha, khususnya kegiatan non-pertanian di pedesaan, akan dipacu dan diperluas.

Perluasan dan pengembangan lembaga ekonomi dimaksudkan untuk memperluas basis perekonomian rakyat dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mandiri, handal, demokratis; meningkatkan pendapatan masyarakat; serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosi-

al. Sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 lembaga ekonomi yang diyakini dapat mengembangkan adalah koperasi. Untuk itu, maka pembinaan dan pengembangan koperasi akan semakin ditingkatkan. Selain koperasi, lembaga keuangan desa juga akan dikembangkan untuk mendorong usaha-usaha produktif di pedesaan. Usaha ekonomi rakyat, termasuk sektor informal, akan terus dibina, diarahkan dan dikembangkan melalui pembinaan kewirausahaan, pendidikan dan latihan keterampilan serta pemberian berbagai kemudahan dan konsesi.

Meskipun pembangunan telah berhasil meningkatkan taraf hidup sebagian besar masyarakat, namun masih terdapat beberapa daerah/desa dan/atau kelompok masyarakat yang masih dikategorikan miskin. Masalah kemiskinan bersifat kompleks, unik dan mencakup banyak aspek sehingga pendekatan dan penanganannya pun harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu serta disesuaikan dengan potensi dan kendala setempat melalui pendekatan kewilayahan *(area development)* dan pendekatan sosial-kemasyarakatan *(community based develepment)* yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya melalui pembinaan sikap dan mental serta peningkatan kemandirian, kemampuan, profesionalisme, produktivitas, daya kreasi dan inovasi.

Agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal, seimbang dan berkesinambungan, maka pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, terencana dan bertanggung jawab serta harus memperhatikan daya dukung, kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Langkah awal yang cukup mendesak antara lain pemantapan kawasan lindung, pengembangan dan penerapan manajemen/ pengelolaan tata air, rehabilitasi lahan kritis dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Sebagai langkah pencegahan, serta untuk mencegah/mengurangi konflik guna lahan dan inefisiensi pemanfaatan lahan, maka kegiatan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan/pelaksanaan dan pengendalian tata ruang perlu dimantapkan dan dilaksanakan secara konsisten. Rencana tata ruang diharapkan menjadi pedoman dan arahan di dalam melaksanakan pembangunan, khususnya yang membutuhkan ruang. Kebijaksanaan tersebut meliputi : penyusunan, penyempurnaan, peningkatan kualitas dan legalisasi rencana tata ruang; peningkatan peran serta pihak swasta dan pengembangan kerjasama pemerintah-

swasta-masyarakat di dalam perencanaan tata ruang; peningkatan keefektifan pelaksanaan rencana; serta penegakan hukum.

Sebagai bagian dari wilayah Metropolitan Bandung, sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung merupakan kawasan perkotaan. Kota-kota dan/atau kawasan perkotaan tersebut perlu penanganan yang sungguh-sungguh melalui pengembangan dan penerapan manajemen pembangunan kota terpadu agar potensinya dapat dimanfaatkan secara optimal serta permasalahan yang timbul dapat diatasi secara efektif. Peran serta dan kerjasama masyarakat/pihak swasta dan pemerintah perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Manajemen lahan perlu dikembangkan untuk mengendalikan spekulasi dan peningkatan harga lahan serta untuk mengarahkan pemanfaatan/penggunaan lahan.

Sejalan dengan pengembangan kota, kebutuhan akan perumahan meningkat dengan pesat. Tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah menyediakan perumahan yang layak dan sehat pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang serta harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau tidak tetap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditempuh berbagai langkah antara lain : pengembangan manajemen lahan dan kawasan siap bangun (KSB), khususnya rumah sangat sederhana (murah), sesuai dengan Rencana Tata Ruang; penyediaan berbagai kemudahan bagi pembangunan rumah sangat sederhana (RSS) atau rumah murah; pengembangan peran serta dan kelembagaan swadaya masyarakat di dalam penyediaan perumahan dan perbaikan lingkungan permukiman; pengembangan rumah susun dan rumah sewa; serta peningkatan keterpaduan di dalam pembangunan perumahan.

Untuk ketepatan kebijaksanaan dan rencana yang ditetapkan, perlu dikembangkan sistem informasi pembangunan agar selalu tersedia data/ informasi yang akurat, aktual, lengkap dan kontinyu serta cepat dan mudah diperoleh. Pengembangan tersebut meliputi: pengembangan sistem; penataan/pengembangan organisasi, koordinasi dan tata laksana; peningkatan kemampuan aparatur; penyediaan sarana dan prasarana; serta dukungan dana/anggaran.

2. Kebijaksanaan Bidang Pembangunan Lima Tahun Keenam

a. Kebijaksanaan Bidang Ekonomi

1) Industri

a) Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi serta mengembangkan dan memeratakan kesempatan berusaha.

b) Peningkatan keterkaitan antara industri hulu-hilir, industri besar-menengah-kecil serta antara sektor industri dengan sektor lainnya.

c) Pendayagunaan dan peningkatan pemanfaatan bahan baku serta komponen lokal dalam proses produksi.

d) Pengembangan dan pembinaan industri kecil dan kerajinan melalui pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat guna, bantuan modal, pemasaran dan manajemen serta pemberian berbagai kemudahan dan konsesi.

e) Pengembangan agroindustri yang didukung oleh pertanian yang tangguh.

f) Pengembangan industri yang tidak mencemari lingkungan dan merusak sumberdaya alam serta menyerap banyak tenaga kerja setempat.

g) Pengarahan dan pengendalian perkembangan industri sesuai dengan rencana tata ruang serta daya dukung dan daya tampung wilayah.

2) Pertanian

a) Pengembangan pertanian terpadu yang berorientasi pasar.

b) Pemantapan swasembada pangan melalui program-program intensifikasi, ekstensifikasi, diversivikasi dan rehabilitasi.

c) Perlindungan terhadap lahan pertanian produktif yang tidak diperuntukkan bagi pengembangan kota sesuai dengan rencana tata ruang.

d) Penetapan perwilayahan komoditas unggulan di setiap wilayah.

c) Pengembangan sistem usaha tani yang menjamin kesejahteraan menuju pertanian yang tangguh.

f) Peningkatan komoditas ekspor pertanian.

g) Pengembangan keterkaitan yang saling menguntungkan antara usaha pertanian berskala besar dengan pertanian rakyat melalui koperasi.

3) Tenaga kerja

a) Perluasan kesempatan kerja, tertutama di pedesaan.

b) Perluasan dan pengembangan program AKAD, AKAN, dan AKAL.

c) Peningkatan, pembinaan dan pengembangan tenaga kerja untuk memasuki lapangan kerja yang terpadu dengan program AKAD, AKAN dan AKAL.

d) Perluasan kesempatan kerja magang di perusahaan-perusahaan.

e) Pembinaan, pengembangan, sekaligus pengendalian pendidikan keterampilan.

f) Peningkatan dan pemantapan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja dalam sistem hubungan industrial Pancasila sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g) Peningkatan dan pengembangan peranan organisasi dan koperasi pekerja.

4) Perdagangan

a) Penataan dan pengembangan sistem tata niaga yang handal, efisien dan efektif.

b) Pengembangan sistem informasi pasar yang efektif, khususnya untuk komoditas pertanian dan industri kecil/ rumahan.

c) Pembinaan dan pengembangan organisasi produsen, khususnya produsen industri kecil/rumahan dan petani.

d) Penigkatan kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri.

e) Peningkatan kemitraan usaha antara usaha skala besar-menengah kecil.

f) Peningkatan perlindungan konsumen.

g) Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.

5) Perhubungan

a) Pengembangan sistem perangkutan terpadu yang efisien.

b) Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, terutama di pedesaan.

c) Peningkatan dan pemantapan jaringan jalan, termasuk jalan lingkar luar regional Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan jalan-jalan yang menghubungkan antar Daerah Tingkat II.

d) Pengembangan angkutan kereta api.

e) Peningkatan peran serta swasta dan pengembangan kerjasama pemerintah-swasta dalam pembangunan dan pengelolaan perangkutan.

6) Pertambangan dan Bahan Galian

a) Penelitian potensi sumberdaya mineral.

b) Pemanfaatan potensi bahan tambang galian C secara optimal sebelum dimanfaatkan untuk penggunaan lainnya.

c) Pemanfaatan teknologi eksplorasi dan eksploitasi pertambangan bahan galian C yang efisien dengan memperhatikan keselamatan kerja dan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.

d) Pembinaan dan pengembangan pertambangan rakyat.

e) Peningkatan upaya rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas eksploitasi galian dan pertambangan.

f) Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan air tanah/ bawah permukaan.

g) Penelitian tata air dan pengembangan konsep manajemen tata air di Cekungan Bandung.

7) Kehutanan

a) Pemeliharaan fungsi hutan untuk menjaga keseimbangan hidroorologis.

b) Peningkatan pengusahaan hutan produksi, hutan rakyat dan produksi hutan alam yang sesuai daya dukungnya.

c) Peningkatan pengelolaan hutan secara terpadu dan berwawasan lingkungan.

d) Peningkatan rehabilitasi hutan dan tanah kritis, konsevasi tanah, flora dan fauna serta pengembangan fungsi DAS.

e) Peningkatan penyediaan lapangan kerja, serta pembinaan penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam pemeliharaan hutan.

f) Inventarisasi penatagunaan hutan untuk memantapkan status kawasan hutan.

8) Pengembangan Dunia Usaha

a) Perlindungan, pembinaan dan pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah melalui pemberian kemudahan, peluang dan konsesi.

b) Pengembangan dan penggalakan kewirausahaan agar mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi, terutama di pedesaan dan daerah tertinggal.

c) Perluasan serta pengembangan kerjasama dan keterkaitan antara usaha skala besar-menengah-kecil berdasarkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

d) Peningkatan penanaman modal oleh masyarakat.

e) Pembinaan dan pengembangan usaha informal dan tradisional secara terpadu.

f) Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, baik dalam bentuk bantuan permodalan, manajemen, kesempatan/peluang usaha. maupun konsensi tertentu.

9) Pariwisata

a) Pengembangan objek wisata alam, objek wisata buatan, wisata budaya dan produk-produk wisata yang memperhatikan lingkungan hidup.

b) Peningkatan promosi pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri secara terpadu.

c) Peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan.

d) Peningkatan pelayanan dan informasi pariwisata.

e) Pengembangan musium terbuka budaya parahyangan sebagai obyek pariwisata, wahana pelestarian budaya dan pembinaan generasi muda.

10) Pos dan Telekomunikasi

a) Peningkatan status dan pelayanan kantor pos.

b) Peningkatan dan perluasan jangkauan telekomunikasi sampai ke seluruh ibukota kecamatan dan desa-desa pusat pertumbuhan.

11) Koperasi

a) Pembinaan kelembagaan koperasi.

b) Pemberian peluang berusaha seluas-luasnya serta konsesi bagi koperasi di segala sektor kegiatan ekonomi.

c) Peningkatan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha pemerintah dan swasta.

12) Pembangunan Daerah

a) Peningkatan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah dan antara desa dan kota.

b) Percepatan pembangunan daerah terpencil, minus, kritis dan daerah tertinggal.

c) Peningkatan kerjasama pembangunan di daerah perbatasan antar Daerah Tingkat II.

d) Pengembangan kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah.

e) Pemantapan kemandirian desa swasembada.

f) Pembangunan perkotaan dalam rangka pengembangan Metropolitan Bandung yang dilaksanakan secara terpadu.

g) Pemantapan penataan ruang yang meliputi Perencanaan, pemanfaatan/pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang.

h) Peningkatan dan pemantapan Catur Tertib Pertahanan.

i) Inventarisasi dan sertifikasi tanah-tanah milik negara/ pemerintah daerah.

j) Pengembangan dan penerapan manajemen lahan.

k) Penataan wilayah administrasi.

13) Keuangan

a) Peningkatan pendapatan daerah, terutama PADS

b) Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang makin efisien dan memenuhi tuntutan pembangunan.

c) Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan oleh masyarakat dan dunia usaha.

d) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

e) Peningkatan investasi, efisiensi, produktivitas dan pendapatan Badan Usaha Milik Daerah.

f) Pengembangan dan peningkatan investasi Badan Usaha Milik Daerah.

g) Pengembangan lembaga keuangan, terutama di pedesaan agar mampu menampung dan menyalurkan minat masyarakat untuk berperan dalam pembangunan.

14) Transmigrasi

a) Peningkatan persiapan dan seleksi calon transmigran.

b) Peningkatan penerangan dan motivasi calon transmigran yang disesuaikan dengan kondisi, potensi lahan dan lapangan usaha di daerah tujuan.

c) Peningkatan persiapan dalam pembekalan keterampilan calon transmigran yang disesuaikan dengan pola usaha di permukiman transmigrasi.

15) Energi

a) Diversifikasi penggunaan energi dengan memanfaatkan sumber-sumber energi potensial seperti air, panas bumi, angin, matahari, gas bio dan briket batubara.

b) Peningkatan pengembangan listrik masuk desa untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

16) Lingkungan Hidup

a) **Peningkatan mutu lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran.**

b) **Pengendalian, pengelolaan sumber daya alam hayati untuk menjamin serta meningkatkan mutu keanekaragaman, keserasian, keselarasan, pemantapan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.**

c) Pemantapan pelaksanaan AMDAL.

d) Peningkatan konservasi kawasan hutan dan penghijauan di lahan kritis.

e) Pengendalian banjir.

f) Peningkatan pembinaan dan penegakan hukum untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan.

g) Peningkatan pengawasan fungsi kawasan lindung yang sesuai dengan RUTR Kabupaten.

h) Peningkatan penelitian neraca sumber daya alam untuk tercapainya keseimbangan fungsi lingkungan hidup.

i) Pemantapan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya air.

b. **Kebijaksanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan**

1) Kesejahteraan sosial

a) Peningkatan kemampuan, keefektifan serta keterpaduan pelayanan dan penanggulangan masalah sosial.

b) Peningkatan kesadaran, kesetiakawanan dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat.

c) Peningkatan kemandirian lembaga-lembaga sosial.

2) Pendidikan

a) Pengembangan pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar, perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan serta pelaksanaan dan pemantapan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

b) Pengembangan pendidikan luar sekolah sesuai dengan perkembangan pasar kerja.

c) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan secara lebih merata dan kerkualitas.

d) Peningkatan pendidikan kewirausahaan, khususnya bagi generasi muda.

e) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan.

f) Pengembangan karier dan peningkatan kesejahteraan guru serta tenaga pendidikan lainnya.

g) Pengadaan dan penempatan tenaga pendidik secara merata di seluruh Wilayah Kabupaten; pemberian insentif dan berbagai kemudahan bagi yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil/tertinggal.

3) Kebudayaan

a) Peningkatan kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengamalkan nilai budaya daerah serta menyerap budaya asing secara selektif yang menunjang pembangunan dan memperkaya budaya daerah.

b) Pengembangan budaya belajar, sikap kerja keras, disiplin, menghargai prestasi, kreatif serta sikap menghormati dan menghargai orang yang lebih tua.

c) Peningkatan pembinaan bahasa daerah serta peningkatan kemampuan bahasa asing.

d) Pelestarian dan pengembangan kesenian daerah serta penumbuhan daya cipta para seniman, peningkatan apresiasi dan kreatifitas masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah.

e) Pengembangan pusat kesenian dan kebudayaan yang terpadu dengan pengembangan pariwisata.

4) Kesehatan

a) Peningkatan kualitas, ragam dan jangkauan pelayanan kesehatan, terutama bagi penduduk yang berpendapatan rendah di daerah pedesaan dan desa tertinggal.

b) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

c) Penurunan angka kematian bayi (IMR) dan ibu hamil

(MMR).

d) Pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan permukiman, perbaikan gizi dan penyediaan air bersih.

e) Pembinaan terhadap praktek pengobatan tradisional yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan.

f) Peningkatan kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

5) Keluarga Sejahtera

a) Pemantapan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

b) Peningkatan peran serta pemuka agama, pemuka masyarakat, organisasi dan lembaga kemasyarakatan, terutama generasi muda, agar gerakan keluarga kecil semakin membudaya.

c) Peningkatan gerakan Keluarga Berencana yang mengarah kepada terwujudnya kesejahteraan keluarga dan mengurangi ketergantungan pada program pemerintah.

6) Kependudukan

a) Peningkatan pembudayaan gerakan Keluarga Berencana, terutama KB mandiri.

b) Pengendalian migrasi masuk dan penyebaran penduduk sesuai dengan daya dukung, daya tampung serta Rencana Tata Ruang.

c) Penyempurnaan administrasi kependudukan.

7) Anak dan Remaja

a) Pembinaan akhlak, moral, budi pekerti, disiplin, tanggung jawab, minat belajar, daya cipta, daya nalar serta perilaku hidup sehat pada anak dan remaja.

b) Pengembangan bakat, minat dan potensi anak dan remaja.

c) Peningkatan kesadaran orang tua untuk memberikan perhatian dan keteladanan pada anak dalam ikatan keluarga yang harmonis.

d) Penanggulangan kenakalan remaja, anak putus sekolah,

dan penyalahgunaan obat.

8) Pemuda

a) Pembentukan watak generasi muda sebagai generasi penerus pejuang bangsa.

b) Pembinaan keimanan, ketakwaan, budi pekerti, kemandirian, kepeloporan dan kewirausahaan generasi muda.

c) Peningkatan kemandirian, kepeloporan dan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah.

9) Peranan Wanita dalam Pembangunan

a) Peningkatan peran aktif wanita dalam pembangunan dan pewujudan keluarga sejahtera dan bahagia.

b) Peningkatan keterampilan, produktifitas dan perlindungan tenaga kerja wanita sesuai kodrat, harkat dan martabatnya.

10) Perumahan dan Pemukiman

a) Peningkatan dan perluasan pembangunan perumahan dan permukiman yang layak sesuai dengan rencana tata ruang serta serasi dengan lingkungan di sekitarnya secara merata, terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau tidak tetap.

b) Peningkatan sumber dana pembangunan perumahan, baik pemerintah maupun swasta dengan penyediaan kredit, pengaturan persewaan dan hipotek serta pengembangan budaya arisan dan gotong royong.

c) Peningkatan pemanfaatan tenaga kerja dan bahan bangunan setempat di dalam pembangunan permukiman.

d) Pemberian peluang seluas-luasnya kepada koperasi dan BUMD dalam pembangunan perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau tidak tetap.

e) Pengembangan dan peningkatan perbaikan lingkungan pemukiman, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

f) Pengembangan dan penerapan manajemen lahan, khususnya di kawasan yang diperuntukan bagi pengembangan perumahan murah/sederhana.

g) Peningkatan dan perluasan pelayanan air bersih, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.

h) Penyediaan dan pengelolaan lahan kuburan.

i) Penyediaan berbagai fasilitas lingkungan permukiman yang layak dan memadai.

j) Pengembangan/peningkatan peranserta dalam penyediaan/pelayanan air bersih.

k) Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

l) Pengembangan pelayanan dan manajemen pengelolaan sampah.

11) Olahraga

a) Pemasyarakatan olahraga.

b) Peningkatan Pembinaan olahraga prestasi secara sistimatis dan terpadu sejak pencarian bakat, pembibitan serta pendidikan dan pelatihan.

c) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana serta pembinaan olahraga.

e) Peningkatan dan pemantapan sarana dan prasarana olah raga di lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan dan lingkungan permukiman.

f) Peningkatan kesejahteraan serta sistem pemberian insentif dan jaminan sosial bagi atlet, pelatih, dan pembina olahraga yang berprestasi.

c) Kebijaksanaan Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1) Pengembangan kehidupan umat beragama untuk membina kualitas keimanan dan ketakwaan serta kerukunan antar umat beragama.

2) Peningkatan dan pengembangan pendidikan agama di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

3) Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan pribadi mau-

pun kehidupan sosial kemasyarakatan.

4) Peningkatan pelayanan demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji dan umroh.

5) Peningkatan pembinaan terhadap penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.

6) Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasana pendidikan dan peribadatan keagamaan.

d. Kebijaksanaan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1) Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam pemanfaatan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terutama teknologi tepat guna.

2) Pemasyarakatan serta peningkatan bimbingan dan latihan teknologi tepat guna, terutama di pedesaan.

3) Peningkatan kegiatan pemanfaatan hasil penelitian untuk kepentingan pembangunan daerah.

4) Transformasi teknologi yang berkesinambungan dan terarah dalam proses produksi secara progresif.

5) Pemberian dukungan dan kemudahan terhadap pembangunan pusat pengembangan dan penelitian sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

6) Perlindungan terhadap obyek serta pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

7) Pengembangan sistem informasi pembangunan secara terpadu dan efektif.

8) Penyediaan serta pengembangan sarana dan media penyampaian informasi.

9) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemasyarakatan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknlogi.

e. Kebijaksanaan Bidang Hukum

1) Materi Hukum

a) Permasyarakatan hukum untuk menjamin agar masya-

rakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

b) Perencanaan dan pembentukan hukum diselenggarakan secara terpadu yang meliputi semua bidang pembangunan yang bertumpu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis, agar produk hukum dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat.

c) Pembangunan dan pemanfaatan hasil penelitian di bidang hukum diarahkan untuk tetap menjamin kebiasaan dan hukum adat yang berlaku untuk menunjang dinamika masyarakat.

2) Aparatur Hukum

a) Peningkatan kualitas aparatur hukum yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat.

b) Pemantapan kelembagaan hukum disertai peningkatan kemampuan profesional.

c) Peningkatan kemampuan penyuluhan hukum disertai keteladanan aparatnya.

d) Penerapan dan penegakan hukum secara tegas dan manusiawi.

e) Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum terutama kepada masyarakat yang tidak mampu.

3) Sarana dan prasarana hukum

a) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana hukum, terutama Badan Peradilan.

b) Pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

f. Kebijaksanaan Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

1) Politik dalam negeri

a) Penataan kehidupan politik yang diarahkan pada penumbuhan dan pengembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b) Peningkatan kehidupan demokrasi, pendidikan politik, dan tegaknya hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka terpeliharanya stabilitas politik yang sehat dan dinamis.

c) Peningkatan pemahaman Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) melalui pendidikan, penataran, dan keteladanan.

d) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di daerah pada tahun 1977.

e) Peningkatan kemampuan, kualitas dan kemandirian organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembauran yang dijiwai sikap mawas diri, tahu diri, tenggang rasa, tanggung jawab serta kesetiakawanan dalam upaya memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

g) Peningkatan komunikasi antara pemerintah, organisasi sosial-politik dan masyarakat untuk mengembangkan Demokrasi Pancasila.

2) Aparatur Pemerintah

a) Pengembangan dan penataan pola/jenjang karier pegawai

b) Peningkatan penyelenggaraan pendidikan penjenjangan karier dan teknis fungsional.

c) Pemberian penghargaan bagi aparatur yang berprestasi, pembinaan mental dan rohani, keteladanan serta penegakan disiplin

d) Peningkatan keterpaduan dan konsistensi pengawasan, baik pengawasan melekat, pengawasan fungsional maupun pengawasan oleh masyarakat.

e) Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah.

f) Pengembangan dan pemantapan organisasi, ketatalaksanaan, dan sistem administrasi pemerintahan dan pemba-

ngunan yang makin handal, profesional efisiensi, efektif, serta terhadap aspirasi rakyat.

g) Peningkatan koordinasi, keterpaduan, dan keselarasan penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

h) Penataan wilayah administrasi pemerintah, baik desa/ kelurahan, kecamatan, wilayah pembantu bupati serta penyiapan kemungkinan penataan kembali wilayah administrasi Pemerintah Tingkat II, sesuai dengan Pola Induk Pembangunan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan memperhatikan pola perwilayahan pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan potensi serta kecenderungan perkembangan yang akan datang.

3) Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

a) Peningkatan kualitas penerangan, komunikasi dan media massa dalam penyampaian informasi pembangunan.

b) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi secara optimal.

c) Pengembangan interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat dalam rangka peningkatan peranan pers yang bertanggung jawab.

d) Peningkatan upaya penyebarluasan informasi melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik, terutama di daerah terpencil.

g) Kebijaksanaan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1) Peningkatan kesadaran bela negara.

2) Peningkatan kemampuan, ketahanan, dan ketertiban masyarakat serta kemampuan pribadi untuk berswadaya aktif dalam menanggulangi dan atau memperkecil berbagai bentuk ancaman.

3) Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengutamakan upaya pencegahan dan penangkalan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara dini

dengan menumbuh kembangkan kesadaran, tanggung jawab dan peran serta masyarakat untuk melaksanakan sistem keamanan lingkungan secara swakarsa.

4) Pemantapan kemanunggalan ABRI dengan rakyat.

F. KEBIJAKSANAAN PENATAAN RUANG DAERAH

1. Struktur Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

Kebijaksanaan Struktur Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung meliputi penataan sistem perkotaan dan perwilayahan pembangunan.

a. Pengembangan Sistem Perkotaan

1) Sistem perkotaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dibagi menjadi 4 hierarki yaitu :

Hierarki I : Kota-Kota yang secara fisik cenderung menyatu dengan kota Bandung dan diarahkan menjadi bagian dari sistem pelayanan Kota Bandung, yaitu : Kotip Cimahi, sebagian wilayah Kecamatan Parongpong, Kecamatan Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Baleendah, Cileunyi dan sebagian wilayah Kecamatan Rancaekek.

Hierarki II : Kota-Kota yang diarahkan menjadi kota menengah yang mandiri sebagai sembrani tandingan Kota Bandung dan menjadi pusat pengembangan regional, terdiri atas Kota Soreang (meliputi sebagian wilayah Kecamatan Soreang dan Katapang), Majalaya (meliputi sebagian wilayah Kecamatan Majalaya, Ibun. dan Paseh) dan Padalarang (meliputi sebagian wilayah Kecamatan Padalarang, Ngamprah, dan Batujajar).

Hierarki III : Kota-kota satelit yang mengemban peran khusus dalam sistem Metropolitan Bandung atau kota-kota yang akan mengalami pertumbuhan cukup pesat. Kota-kota yang dipacu pertumbuhannya untuk menerima limpahan

pertumbuhan Kota Bandung dikatagorikan Hierarki III-A, yaitu : Kota Cicalengka (termasuk sebagian wilayah Kecamatan Cikancung), Ciparay, Banjaran (termasuk Kecamatan Pameungpeuk), Lembang dan Cililin. Kota-kota Hierarki III-B meliputi : Kota Pangalengan, Ciwidey (sebagian wilayah Kecamatan Ciwidey dan Pasirjambu), Rajamandala (Cipatat), Cikalongwetan dan Cisarua.

Hierarki IV : Ibukota Kecamatan yang diarahkan berfungsi sebagai pusat pelayanan/pengembangan pedesaan, yaitu : Cipeundeuy, Sindangkerta, Gununghalu, Cipongkor, Rancabali, Pacet dan Kertasari.

2) Peran dan Fungsi Kota-Kota.

Kota-kota Hierarki I berperan sebagai penampung rembesan pertumbuhan Kota Bandung sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan invasi pertumbuhan ke kawasan-kawasan persawahan subur sebagai sabuk hijau yang mengelilingi dan memisahkan Kota Bandung dengan kota-kota kecil di sebelah selatannya. Fungsi utama masing-masing kota adalah :

a) Kotip Cimahi : Pendidikan militer, industri, permukiman dan pelayanan kota.

b) Kecamatan Margaasih : Permukiman.

c) Kecamatan Margahayu : Permukiman, Pendidikan militer

d) Kecamatan Dayeuhkolot : Industri dan permukiman.

e) Kecamatan Baleendah : Permukiman, fasilitas sosial

f) Kecamatan Bojongsoang : Permukiman.

g) Kecamatan Cileunyi : Permukiman, industri, perangkutan (terminal).

h) Kota Rancaekek : Permukiman, industri.

Kota-kota hierarki II berperan sebagai pusat pelayanan regional hierarki kedua setelah Kota Bandung. Fungsi masing-masing kota adalah :

a) Kota Soreang :
   (1) Pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
   (2) Pusat pelayanan sosial ekonomi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung bagian selatan.
   (3) Permukiman.
   (4) Industri rumahan/kerajinan.

b) Kota Padalarang :
   (1) Pusat pelayanan sosial ekonomi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung bagian barat.
   (2) Industri.
   (3) Pariwisata.
   (4) Perangkutan dan Pergudangan.
   (5) Permukiman.

c) Kota Majalaya :
   (1) Pusat pelayanan sosial ekonomi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung bagian timur.
   (2) Industri.
   (3) Permukiman.

Kota-kota hierarki III berperan sebagai kota satelit yang mengemban peran khusus dalam sistem Metropolitan Bandung. Fungsi kota-kota hierarki III sebagai berikut :

a)	Kota Cicalengka	:	Permukiman, industri.
b)	Ciparay	:	Permukiman.
c)	Bajaran	:	Permukiman, industri.
d)	Lembang	:	Pariwisata, pendidikan militer, penelitian.
e)	Cililin	:	Permukiman, agropolitan.

f) Kota Pangalengan : Pariwisata, agropolitan.

g) Kota Ciwidey : Industri rakyat/kecil, pariwisata.

h) Kota Cikalongwetan : Permukiman, agropolitan.

i) Rajamandala (Cipatat) : Permukiman, pertambangan.

k) Kota Cisarua : Agropolitan.

Kota-kota hierarki IV berperan sebagai pusat pelayanan terdepan dalam rangka pengembangan pedesaan.

b. **Perwilayahan Pembangunan**

Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dibagi menjadi 3 Wilayah Pembangunan (WP) yang meliputi beberapa Sub-Wilayah Pembangunan (SWP), yaitu : WP Bandung Barat-Utara (disingkat WP Bandung Barat), WP Bandung Selatan Timur (disingkat WP Selatan), dan WP Bandung Tengah (disingkat WP tengah). WP Bandung Barat meliputi : SWP Lembang (Wilayah Pembantu Bupati/WPB Lembang, Kecamatan Cimenyan, dan Kecamatan Cilengkrang), SWP Padalarang (WPB Padalarang dan WPB Cikalongwetan) dan SWP Cililin (WPB Cililin). WP Bandung Selatan meliputi SWP Soreang (WPB Soreang, WPB Banjaran dan Kecamatan Katapang) dan SWP Majalaya (WPB Ciparay kecuali Kecamatan Baleendah, WPB Majalaya dan WPB Cicalengka kecuali Kecamatan Rancaekek). WP Bandung Tengah meliputi SWP Cimahi (Kotip Cimahi dan Kecamatan Margaasih), SWP Margahayu (Kecamatan Margahayu, Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang) serta SWP Cileunyi (Kecamatan Cileunyi dan Kecamatan Rancaekek).

WP Barat diarahkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung bagian barat sebagai akibat dibukanya jalan tol Cipularang serta kemungkinan pemekaran Daerah Tingkat II. WP Bandung tengah diarahkan untuk menampung rembesan pertumbuhan Kota Bandung dalam satu kesatuan sistem pelayanan kota agar tidak menginvasi kawasan pesawahan di bagian selatannya. SWP Cimahi dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan pembentukan Kotamadya Dati II Cimahi. SWP Cileunyi diarahkan untuk menunjang Kota Perguruan Tinggi Jatinangor serta bersama-

sama dengan kecamatan Cikeruh dan Cimanggung di Kabupaten Sumedang merupakan daerah segitiga pengembangan di wilayah Metropolitan Bandung bagian Timur.

Penetapan fungsi setiap wilayah menganut asas keseimbangan dan pemerataan pertumbuhan melalui spesialisasi kegiatan yang didasarkan pada : potensi, kendala, basis ekonomi, peranannya dalm lingkup yang lebih luas serta prospek dan kecenderungan perkembangan masing-masing wilayah.

Fungsi masing-masing wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

WP Bandung Barat : Pariwisata, Industri, Pertanian Lahan kering, Pertanian lahan basah, Perikanan, Pertambangan, kawasan lindung.

SPW Lembang : Pariwisata, Pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, peternakan, pendidikan khusus dan penelitian, kawasan lindung.

SWP Padalarang

SWP Padalarang diarahkan untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan yang semakin pesat sesuai dengan makin tingginya aksesibilitas wilayah ini akibat dibangunnya jalan tol Cipularang. Fungsi SWP ini adalah : Permukiman, industri, pariwisata, pergudangan, perangkutan, pertambangan, pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, perikanan dan kawasan lindung.

SWP Cililin : Perikanan, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, peternakan, industri rumahan/kerajinan, pariwisata dan kawasan lindung.

WP Bandung Selatan : Pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, pariwisata, industri, kawasan lindung.

SWP Soreang : Pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, pariwisata, permukiman, kawasan lindung.

SWP Majalaya : Industri, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, permukiman, kawasan lindung.

WP Bandung Tengah : Industri, permukiman, pendidikan militer, jasa perkotaan.

SWP Cimahi : Industri, permukiman, pendidikan militer, jasa perkotaan.

SWP Margahayu : Permukiman, industri, perkotaan, pelayanan sosial, pendidikan militer.

SWP Cileunyi : Permukiman, industri, perangkutan, pertanian lahan basah.

Pembagian dan penetapan fungsi wilayah yang lebih terinci ditetapkan di dalam rencana Tata Ruang wilayah kabupaten.

2. Prioritas Pengembangan Pemanfaatan Ruang

a. Umum

1) Pemetaan kebijaksanaan pemanfaatan ruang pada skala yang memadai.

2) Identifikasi/Inventarisasi dan pemetaan kondisi, potensi, permasalahan dan kendala, bagi pelaksanaan kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

3) Penyusunan rencana/program pelaksanaan/tindakan sebagai penjabaran dari kebijaksanaan tersebut.

4) Penyusunan rencana tata guna lahan dan pencadangan lahan bagi kegiatan budidaya sesuai dengan kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

5) Pengamanan daerah -daerah yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dari pemanfaatan selain yang telah ditetapkan.

6) Penyusunan studi-studi kelayakan dan rencana-rencana pengembangan berbagai kegiatan sebagai penjabaran/pengisian dari kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau rencana tata guna lahan.

7) Pemasyarakatan/penyebarluasan kebijaksanaan, hasil-hasil studi, dan rencana-rencana yang berkaitan dengan pemanfaatan/pengarahan tata ruang.

8) Pengetatan perizinan dan peningkatan pengawasan/pengendalian tata ruang untuk mengurangi penyimpangan/pelanggaran terhadap kebijaksanaan/rencana yang telah ditetapkan.

9) Pengamanan daerah-daerah yang diperkirakan akan menjadi bandar udara baru.

10) Penyusunan strategi dan rencana pengembangan kawasan perkotaan.

11) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota sampai kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (pada peta skala 1 : 5.000) untuk kota-kota orde I-o sampai kota orde III-B.

12) Penyusunan rencana pengembangan kawasan-kawasan strategis seperti : Zone industri, kawasan pariwisata dan sebagainya.

13) Pengembangan dan penerapan manajemen lahan sebagai salah satu bentuk pengendalian dan pengarahan pertumbuhan pemanfaatan lahan.

b. Prioritas Pengembangan Wilayah

Prioritas pengembangan meliputi sektor strategis dan garis besar program pembangunan yang memiliki nilai strategis dan menjadi prioritas pada pelita keenam di setiap wilayah berdasarkan potensi dan masalah masing-masing.

1) WP. BANDUNG BARAT

a) SWP. Lembang

(1) Sektor Strategis

(a) Pertanian dan Kehutanan (holtikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan).

(b) Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

(c) Perumahan dan Permukiman.

(d) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

(e) Sumber Daya Air dan Irigasi.

(f) Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian.

(2) Kegiatan Prioritas

(a) Pemantapan kawasan lindung, rehabilitasi lahan

kritis serta konservasi tanah dan air.

(b) Pengembangan pertanian lahan kering secara terpadu yang menunjang fungsi lindung, konservasi tanah dan air, pariwisata serta ekspor komoditas non-migas.

(c) Pengendalian pertumbuhan kawasan terbangun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku serta pengendalian spekulasi lahan.

(d) Pengembangan kegiatan dan sarana penunjang pariwisata, kebudayaan/kesenian dan pertanian secara terpadu.

(e) Pengembangan jaringan jalan Lembang-Cibodas-Palintang-Cileunyi dan Cisarua-Pasirlangu-Cipada-(terus ke Pangheotan-Cikalong wetan) sebagai bagian dari jalan lingkar luar Kabupaten Bandung.

(f) Pengembangan jaringan jalan radial yang menghubungkan jalan lingkar regional dengan Kota Bandung dan kota-kota lain disepanjang koridor Timur-Barat.

(g) Pengembangan jaringan jalan alternatif yang menghubungkan kawasan permukiman kota di Kecamatan Parongpong dengan Pusat Kota Cimahi dan Kota Bandung.

(h) Pengembangan jalan-jalan ekonomi pedesaan, khususnya untuk membuka daerah-daerah sentra produksi dan daerah yang masih terisolasi.

(i) Pembangunan prasarana perkotaan di Kota Lembang.

(j) Penyediaan air bersih pedesaan.

(k) Penggalakan Catur Tertib Pertanahan.

(l) Pengamanan daerah di sekitar Observatorium Boscha.

(m) Pencadangan lahan untuk kawasan pusat per-

kantoran tingkat kecamatan sesuai rencana kota.

b) SWP. Padalarang

(1) *Sektor Strategis*

(a) Industri.

(b) Perumahan dan permukiman.

(c) Transportasi, Meteorologi dan Geofisika.

(d) Pertambangan dan energi.

(e) Pertanian & kehutanan (holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan).

(f) Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan koperasi.

(g) Tenaga kerja

(h) Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

(i) Sumber Daya Air dan Irigasi.

(j) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

(k) Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.

(2) *Kegiatan Prioritas*

(a) Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Program Pembangunan Jangka Menengah kawasan perkotaan dan atau yang akan dikembangkan sebagai wilayah perkotaan.

(b) Penataan/pengembangan sistem tranportasi secara menyeluruh dan terpadu, terutama pembangunan jaringan jalan alternatif antar kota, pembangunan *interchange,* pembangunan terminal intermoda, peningkatan pelayanan Kereta Api bagi para penglaju serta pengembangan pergudangan dan terminal Peti Kemas di Kota Padalarang.

(c) Pencadangan dan pengamanan lahan untuk pusat perkantoran pemerintah sebagai antisipasi terhadap kemungkinan pemekaran wilayah Daerah Tingkat II.

(d) Relokasi dan pengembangan pusat pertokoan

(*Central Business District*) dan pasar kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Padalarang.

(e) Penataan kawasan industri dan permukiman serta pengembangan permukiman sederhana murah serta rumah sewa/susun.

(f) Pengembangan kegiatan dan fasilitas pariwisata di sekitar Waduk Saguling dan Situ Ciburuy.

(g) Pengawasan dan pengendalian kegiatan penambangan Galian-C.

(h) Pengendalian spekulasi lahan dan Penggalakan Catur Tertib Pertanahan.

(i) Pengembangan Manajemen Perkotaan, termasuk pengembangan kerjasama pemerintah dengan masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan kota.

(j) Penyediaan sarana air bersih dan pengelolaan air baku.

(k) Penyuluhan dan pelatihan untuk mengantisipasi peluang usaha/lapangan kerja seiring dengan perkembangan kota.

c) SWP Cililin

(1) *Sektor Strategis*

(a) Industri (rakyat/kerajinan/rumahan).

(b) Pertanian dan kehutanan (Perikanan, pertanian lahan basah, peternakan, pertanian lahan kering).

(c) Sumber Daya Air dan Irigasi.

(d) Pembangunan Daerah dan Transmigrasi (Pembangunan Desa Tertinggal).

(e) Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja.

(f) Transportasi, Meteorologi dan Geofisika.

(g) Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan

Olahraga.

(2) *Kegiatan Prioritas*

(a) Pengentasan kemiskinan melalui Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) yang bertumpu pada pengembangan kegiatan agroindustri rumahan, peternakan, perikanan dan pertanian lahan basah.

(b) Pengembangan jaringan jalan, terutama ke Wilayah lain (Kab. Cianjur, Kecamatan Cipatat), serta ke sentra-sentra produksi dan daerah-daerah yang terisolasi/tertinggal.

(c) Pengembangan pertanian lahan basah (pencetakan sawah, intensifikasi dan pengembangan irigasi).

(d) Pengembangan agrobisnis

(e) Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, terutama pendidikan keterampilan pertanian dan agroindustri kerajinan.

(f) Peningkatan status Perwakilan Kecamatan Rongga menjadi kecamatan.

2. WP BANDUNG SELATAN

a) SWP Soreang

(1) *Sektor Strategis*

(a) Aparatur Pemerintah dan Pengawasan

(b) Perumahan dan Permukiman.

(c) Transportasi, Meteorologi dan Geofisika.

(d) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

(e) Pertanian dan kehutanan (lahan basah, holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan).

(f) Sumber Daya Air dan Irigasi.

(g) Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi.

(h) Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

(2) ***Kegiatan Prioritas***

(a) Pembangunan Kota Soreang dan (pembangunan jaringan jalan, terminal, perumahan, prasarana dan sarana sosial-ekonomi kota lainnya serta pelaksanaan konsolidasi lahan, pembangunan/ penyediaan prasarana dan sarana perkantoran Pemerintah Daerah, penataan ruang dan bangunan)

(b) Pembangunan Kota Banjaran (Penataan ruang, penataan pasar dan terminal, pembangunan jalan lingkar serta pembangunan/penyediaan prasarana kekotaan lainnya).

(c) Pengembangan manajemen pembangunan kota serta pengembangan peran serta aktif masyarakat dan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dalam pembangunan kota.

(d) Pengamanan kawasan pertanian subur yang tidak diarahkan menjadi kawasan terbangun menurut Rencana Tata Ruang, baik persawahan maupun lahan kering, dari pengalihan fungsi/tata guna lahan.

(e) Pengendalian pertumbuhan industri (tambahan industri hanya terbatas untuk mengisi ruang-ruang kosong di antara pabrik yang sudah ada dalam rangka meningkatkan efisiensi dan keserasian lingkungan serta menanggulangi pencemaran lingkungan)

(f) Peningkatan kegiatan rehabilitas lahan kritis dan konservasi tanah dan air serta pengembangan pertanian lahan kering terpadu pada lahan-lahan kritis dan kawasan pertanian di daerah tangkapan/ peresapan air (*catchment/recharge areas*).

(g) Pengendalian banjir serta penanggulangan bencana akibat banjir.

(h) Pengembangan budidaya perikanan, terutama pendederan, sebagai bagian dari mata rantai budi-

daya/usaha perikanan menggantikan fungsi Kecamatan Bojongsoang.

(i) Pengembangan sentra-sentra produksi sayuran dan pemuliaan tanaman yang berorientasi ekspor.

(j) Pengembangan kegiatan dan fasilitas pariwisata di Kecamatan Ciwidey, Pasirjambu, Pangalengan dan Banjaran.

(k) Pengembangan industri kerajinan/rumahan dan industri kecil yang tidak polutif, khususnya agro-industri dan industri yang menunjang pariwisata.

(l) Penataan ruang kota dan daerah sepanjang jalur wisata.

(m) Pengembangan jaringan jalan Cipelah-Rancabali dan Cisondari-Gambung-Palayangan (Situ Cileunca)-Santosa-Gn. Papandayan; Padalarang-Soreang-Banjaran-Ciparay, koridor-koridor ke Kota Bandung; Panundaan (Ciwidey)-Celak (Gununghalu)

(n) Pengamanan lahan dan bangunan milik Perumka sebagai antisipasi terhadap kemungkinan pengembangan angkutan KA Bandung-Ciwidey.

(o) Pengendalian spekulasi lahan dan Penggalakan Catur Tertib Pertanahan

(p) Peningkatan status Perwakilan Kecamatan Cimaung dan Rancabali menjadi kecamatan.

b) SWP Majalaya

(1) *Sektor Strategis*

(a) Industri

(b) Perumahan dan permukiman.

(c) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

(d) Sumber Daya Air dan Irigasi

(e) Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika.

(f) Pertanian dan kehutanan (pertanian lahan basah,

holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan)

(g) Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi.

(h) Tenaga Kerja

(i) Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

(2) ***Kegiatan Prioritas***

(a) Pembangunan Kota Majalaya, Cicalengka dan Ciparay (penataan ruang, pengembangan manajemen pembangunan kota, penataan sistem transportasi, penataan/pembangunan sistem drainase dan penyediaan air bersih).

(b) Pengendalian banjir, penanggulangan pencemaran lingkungan, pengendalian eksploitasi sumber air, terutama air tanah dan mata air.

(c) Pengendalian spekulasi dan harga lahan serta pengembangan manajemen lahan.

(d) Pengamanan kawasan pertanian subur yang tidak diarahkan menjadi kawasan terbangun menurut Rencana Tata Ruang, baik persawahan maupun lahan kering, dari pengalihan fungsi/tata guna lahan.

(e) Peningkatan kegiatan rehabilitas lahan kritis dan konservasi tanah dan air serta pengembangan pertanian lahan kering terpadu pada lahan-lahan kritis dan kawasan pertanian di daerah tangkapan /peresapan air (*catchment/recharge areas*).

(f) Pengembangan industri pada zone-zone yang telah ditentukan di dalam rencana tata ruang.

(g) Pengembangan industri kerajinan/rumahan dan industri kecil non polutif yang terkait dengan industri menengah dan besar di sekitarnya.

(h) Pengembangan ternak domba dan sapi potong.

(i) Pengembangan pusat pembenihan ikan.

(j) Review dan perencanaan kembali luas dan tingkat pelayanan daerah irigasi.

(k) Peningkatan jalan Ciluluk-Cijapati dan Ciluluk-Cicalengka.

(l) Pengamanan lahan dan bangunan milik Perumka sebagai antisipasi terhadap kemungkinan pengembangan angkutan Kereta Api Bandung-Ciwidey.

(m) Peningkatan status Perwakilan Kecamatan Solokan Jeruk dan Nagreg menjadi kecamatan.

3) **WP. BANDUNG TENGAH**

a) **SWP. Cimahi**

(1) ***Sektor Strategis***

(a) Aparatur Pemerintah dan Pengawasan

(b) Perumahan dan Permukiman

(c) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

(d) Transportasi, Meteorologi dan Geofisika

(e) Industri

(f) Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi

(g) Tenaga Kerja

(2) ***Kegiatan Prioritas***

(a) Pengembangan manajemen pembangunan kota (termasuk di antaranya : penataan ruang, peningkatan dan pengembangan PADS, pengelolaan persampahan, manajemen lahan, pengembangan kelembagaan, peningkatan kemampuan aparatur di dalam pengelolaan kota, perintisan pembentukan forum komunikasi antar warga kota).

(b) Penyediaan air bersih.

(c) Pengembangan, penataan dan pengendalian kegiatan industri sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan yang berlaku.

(d) Penataan dan pengembangan sistem transportasi (relokasi terminal, penataan rute angkutan penumpang umum, pengembangan transportasi masal (bus dan kereta api), peningkatan/pembangunan jaringan jalan sesuai dengan rencana tata ruang kota.

(e) Perbaikan permukiman kumuh dan pembangunan rumah sewa, terutama di sekitar zone industri.

(f) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik yang disebabkan oleh kegiatan industri, domestik, maupun galian-C.

(g) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan daerah-daerah di sekelilingnya.

b) **SWP. Margahayu**

(1) *Sektor Strategis*

(a) Perumahan dan Permukiman

(b) Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika

(c) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

(d) Sumber Daya Air dan Irigasi

(e) Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi.

(f) Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga.

(2) *Kegiatan Prioritas*

(a) Penataan sistem transportasi (manajemen lalu lintas, pembangunan/peningkatan jalan alternatif sebagai koridor ke Kota Bandung, penataan persimpangan jalan dsb).

(b) Penataan ruang (termasuk penataan dan penertiban bangunan)

(c) Penataan dan pengintegrasian ruang kawasan

permukiman, melalui pengembangan jaringan jalan penghubung antar lingkungan permukiman, pengisian daerah-daerah kosong di antara kawasan permukiman.

(d) Penataan zone industri Dayeuhkolot.

(e) Studi pengembangan kawasan Tegalluar.

(f) Pengendalian banjir dan pencemaran lingkungan.

(g) Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan pengembangan rumah susun sewa.

(h) Penyediaan prasarana air bersih.

(i) Pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga di Baleendah.

(j) Pengembangan koordinasi dan kerjasama dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di dalam penyediaan prasarana dan sarana perkotaan serta pelayanan lainnya.

(k) Pengamanan lahan dan bangunan milik Perumka.

c) SWP Cileunyi

(1) *Sektor Strategis*

(a) Perumahan dan Permukiman

(b) Transportasi, Meteorologi dan Geofisika

(c) Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

(d) Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi.

(e) Sumber Daya Air dan Irigasi

(f) Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga.

(g) Industri

(2) *Kegiatan Prioritas*

(a) Integrasi penataan ruang dengan tata ruang Ka-

wasan Perguruan Tinggi Jatinangor dan Kawasan industri Cimanggung (Kabupaten Sumedang)

(b) Pengembangan dan perluasan Terminal Bus Antar Kota dan Dalam Kota dengan membuka kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta.

(c) Pembangunan jaringan jalan alternatif Cibiru-Rancaekek, paralel dengan jalan regional Bandung-Cicalengka, menyusuri rel Kereta Api.

(d) Pengembangan angkutan kereta api.

(e) Study pengembangan kawasan Tegalluar.

(f) Penyediaan prasarana air bersih.

(g) Pengamanan kawasan lindung di wilayah bagian utara

(h) Pengendalian pencemaran limbah serta eksploitasi air tanah oleh kegiatan industri.

(i) Pembatasan/pengendalian pertumbuhan kawasan terbangun di sebelah selatan-barat rel Kereta Api. Pengembangan permukiman diarahkan mengisi lahan kosong di antara kawasan permukiman yang sudah ada. Pengembangan industri diarahkan untuk mengisi ruang kosong di antara industri yang sudah ada sepanjang jalan Rancakek-Cicalengka.

(j) Pengendalian banjir.

G. STRATEGI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Adapun untuk terlaksananya arah kebijaksanaan pembangunan daerah selama Pelita Kelima, strategi pembiayaan pembangunan yang akan ditempuh sebagai berikut :

1. Sesuai dengan penggarisan nasional bahwa pembangunan di daerah lebih diarahkan pada peningkatan perekonomian dan partisipasi masyarakat, maka Strategi Pembiayaan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diarahkan kepada pendayagunaan potensi dana yang berasal dari masyarakat. Kontribusi pembiayaan sektor masyarakat atau swasta diusahakan lebih besar daripada pembiayaan pembangunan pemerintah.

2. Perlu diciptakan iklim usaha yang saling mengisi antara masyarakat dan pemerintah melalui pengembangan bentuk-bentuk/pola kerjasama pemerintah dengan swasta (BOT, BOL, *ruislaag, joint operation* dan sebagainya) serta langkah-langkah deregulasi, debirokrasi dan peningkatan kepastian hukum.
3. Meningkatkan alokasi anggaran sektoral, APBN, APBD Tingkat I, Pinjaman Luar Negeri, Bantuan Luar Negeri yang berorientasi pada program pembangunan di daerah serta diarahkan kepada program-program yang bersifat mandiri dan berkelanjutan untuk kepentingan daerah, regional dan nasional.
4. PADS diarahkan kepada kepentingan dan peningkatan pendayagunaan daerah sendiri guna menghindarkan terjadinya ekonomi biaya tinggi dan mengurangi beban masyarakat.

BAB V

PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah TIngkat II Bandung ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai pencerminan kehendak seluruh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dalam melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan di daerah.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung pada dasarnya merupakan arahan Pembangunan Daerah yang ditetapkan setiap lima tahun selaras dengan perkembangan dan tingkat kemajuan kehidupan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang pelaksanaannya dituangkan dalam rangkaian Pembangunan Lima Tahunan Daerah dan Program Pembangunan Tahunan Daerah.

Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

B. TAHAPAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN DAERAH

Pembangunan Daerah merupakan rangkaian upaya Pembangunan Jangka Panjang Dua Puluh Lima Tahunan dan Jangka Menengah Lima Tahunan, dengan mendayagunakan seluruh Sumber Daya untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kedua Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah mengisi tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kedua Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang ***REPEH RAPIH KERTARAHARJA*** melalui pembentukan manusia yang ***GALEUH GALIH LUHUR-LUHUNG PARIGEL GESIT BINANGKIT***. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu ditetapkan arah kebijaksanaan pembangunan lima tahunan yang berperan sebagai arahan dan batasan bagi penentuan kebijaksanaan pembangunan pada periode yang bersangkutan.

Arah kebijaksanaan pembangunan setiap PELITA adalah sebagai berikut :

PELITA VI : **KONSOLIDASI DAN PEMANTAPAN DASAR-DASAR PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN**

Pada Pelita ini pembangunan diarahkan pada upaya untuk menyiapkan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya pembangunan secara berkesinambungan. Masalah-masalah yang belum terselesaikan pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama serta masalah-masalah yang timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Pertama diupayakan dapat diselesaikan pada periode ini, sekaligus konsolidasi hasil-hasil yang telah dicapai.

Kondisi yang ingin dicapai adalah semakin kokohnya ketahanan sosial budaya masyarakat, meningkatnya ketahanan ekonomi, terciptanya iklim yang menunjang pengembangan usaha, terutama bangkitnya ekonomi rakyat dan koperasi, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, makin mantapnya penataan ruang, serta terjaganya keseimbangan alam dan keserasian lingkungan.

Pemantapan ketahanan ekonomi akan ditempuh melalui : peningkatan mutu dan pendayagunaan sumber daya manusia; pengembangan kegiatan industri yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang tinggi; pengembangan kemitraan usaha; perlindungan dan pengembangan koperasi, pengusaha golongan ekonomi lemah, dan BUMD. Pengembangan usaha pertanian yang berorientasi pasar, penataan sistem tataniaga, serta pemantapan swasembada pangan. Iklim yang menunjang pengembangan usaha akan diciptakan melalui upaya debirokratisasi, deregulasi dan peningkatan pelayanan aparatur pemerintah serta penyempurnaan dan pemasyarakatan produk hukum.

Ketahanan sosial-budaya masyarakat akan diwujudkan melalui peningkatan serta reaktualisasi pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan pra-sekolah dan pendidikan dasar, pendidikan luar sekolah, serta pembinaan anak, remaja dan generasi muda.

Peningkatan peran serta masyarakat akan ditempuh melalui antara lain : peningkatan keterbukaan dan komunikasi politik serta pembinaan dan pengembangan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pemeliharaan keseimbangan alam dan keserasian lingkungan akan ditempuh melalui pemantapan penataan ruang, khususnya perencanaan tata ruang serta pengendalian kerusakan alam dan pencemaran lingkungan.

PELITA VII : PEMANTAPAN STRUKTUR EKONOMI YANG SEMAKIN KOKOH DAN EFISIEN SEIRING DENGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada Pelita VII, berbagai prakondisi bagi tumbuhnya pembangunan secara berkesinambungan sudah terpenuhi. Dengan demikian, arah pembangunan pada periode ini ditekankan pada upaya pemantapan struktur ekonomi yang semakin kokoh dan efisien. Kegiatan ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif yang tinggi serta tidak mengganggu keseimbangan alam dan tidak mencemari lingkungan.

Seiring dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, usaha ekonomi rakyat diharapkan tumbuh pesat. Demikian pula Koperasi dan BUMD mampu mensejajarkan diri dengan usaha swasta besar dan maju. Kegiatan pertanian sudah terkait dengan ekonomi pasar. Teknologi tepat guna telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada periode ini, pelaku ekonomi semakin banyak, kemitraan usaha tumbuh pesat.

PELITA VIII : PENGEMBANGAN EKONOMI YANG DITUNJANG OLEH TEKNOLOGI TINGGI DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG MAJU

Pada Pelita VIII, sumber daya manusia yang menguasai teknologi relatif sudah tersedia. Demikian pula, tingkat kecerdasan dan keterampilan masyarakatnya sudah relatif tinggi. Dengan demikian, penggunaan teknologi diharapkan mewarnai pembangunan pada periode ini. Industri yang dikembangkan, selain bebas polusi dan tidak banyak menggunakan air, juga sarat dengan teknologi tinggi. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pertanian dan industri semakin meningkat. Masyarakat dipacu untuk mampu mengembangkan dan membuat inovasi-inovasi di bidang teknologi tepat guna.

PELITA IX : PENGEMBANGAN MASYARAKAT INDUSTRI YANG MAJU DAN MANDIRI, DAN BERBUDAYA TINGGI

Meningkatnya kesejahteraan dan kemajuan diberbagai bidang, serta semakin terbukanya informasi, akan mengubah pranata sosial, sistem nilai, dan budaya masyarakat. Masyarakat akan semakin kritis, kreatif, inovatif, produktif, serta cenderung individualistik dan materialistik. Sistem nilai dan norma-norma sosial semakin longgar. Kesejahteraan material relatif tinggi.

Pada periode ini, sebagai kelanjutan dari Pelita-pelita sebelumnya, penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta strategi pengembangan budaya sangat penting untuk menangkal pengaruh negatif pembangunan serta mengembangkan nilai-nilai positif kebudayaan daerah yang dipadukan dengan nilai-nilai positif dari kemajuan menuju suatu tingkat peradaban/kebudayaan yang lebih tinggi.

PELITA X : PERWUJUDAN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG REPEH RAPIH KERTARAHARJA

Pada periode ini, kebutuhan fisik dan sosial masyarakat telah terpenuhi. Karena itu, pembangunan tahap ini lebih diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan yang relatif sudah mapan serta pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri masyarakat.

Arah kebijaksaan pembangunan pada setiap lima tahunan dirumuskan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang setiap lima tahun sekali substansinya ditinjau kembali, termasuk arah kebijaksanaan tersebut.

C. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam disusun berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pembangunan Lima Tahun Keenam yang meliputi kurun waktu Tahun 1994/1995-1998/1999, pelaksanaannya tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, Lima Kebijaksanaan Strategis Jawa Barat dan Sepuluh Kebijaksanaan Strategis Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan, kelima unsur Kebijaksanaan Strategis Jawa Barat dan kesepuluh unsur Kebijaksanaan Strategi itu saling berkait serta perlu dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat.

Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang terdiri atas Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai kebijaksanaan operasional dan program pembangunan tahunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Pembangunan Daerah, peranan lembaga yang melaksanakan fungsi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian perlu ditingkatkan.

BAB VI
PENUTUP

Berhasilnya Pembangunan Daerah bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin serta kejujuran Aparatur Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Sehubungan dengan itu, maka semua kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan harus berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tahapan, sasaran, dan kebijaksanaan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah, serta Rencana Pembangunan Tahunan Daerah secara konsisten.

Hasil pembangunan itu sendiri harus dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk mencapai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan tersebut sekaligus harus mendukung ketahanan nasional yang pada gilirannya harus memberikan landasan bagi generasi yang akan datang untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Soreang, 5 Februari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,	
Cap/ttd	Cap/ttd
HOLIL SUKARDI	H. U. HATTA D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP 480 042 996

DAFTAR ISTILAH

REPEH RAPIH : Rukun, damai, tenteram, tertib, aman, serasi, selaras, seimbang.

KERTARAHARJA : Subur, makmur, sejahtera lahir dan batin.

GALEUH-GALIH : Jiwa yang tulus dan suci, penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

LUHUR-LUHUNG : Berpikiran maju, bernalar dan berdaya pikir tinggi, berkemampuan tinggi, berpengetahuan dan berwawasan luas, arif, bijaksana.

PARIGEL GESIT BINANGKIT :

Kreatif, inovatif, produktif, dinamis, mandiri, berjiwa kewirausahaan tinggi, profesional, sehat dan bugar.

AKAD : Antar Kerja Antar Daerah. Program penyiapan/pengerahan tenaga kerja antar daerah (Propinsi).

AKAN : Antar Kerja Antar Negara. Program penyiapan/pengerahan tenaga kerja antar negara.

AKAL : Antar Kerja Antar Lokal. Program penyiapan/pengerahan tenaga kerja antar lokal/wilayah di dalam wilayah kabupaten.

Tingkat Partisipasi (Net Enrollment Rate/NER) Sekolah Dasar :

Angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah murid SD yang berumur 7-12 tahun dengan jumlah penduduk usia SD (7-12 tahun).

Indeks Mutu Hidup : Angka yang menunjukkan tingkat/kualitas hidup, dihitung berdasarkan Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Melek Huruf, dan Status Gizi.

Angka Harapan Hidup (AHH) :

Batas usia rata-rata yang diharapkan, dihitung dengan mempertimbangkan faktor kesehatan. AHH menggambarkan derajat kesehatan masyarakat.

Angka Kematian Bayi (AKB) :

Jumlah bayi yang meninggal dunia per 1000 kelahiran hidup.

Agropolitan : Kota pertanian, yang berfungsi melayani kawasan pertanian di sekitarnya (sebagai kolektor hasil pertanian dan distributor sarana produksi pertanian dan kebutuhan lainnya dari penduduk pedesaan).

Fungsi (Kota/Wilayah) :

Kegiatan utama yang menjadi basis ekonomi kota/wilayah tersebut atau/dan memiliki peranan dalam lingkup regional.

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

KEBIJAKSANAAN TATA RUANG

